

LAPORAN KINERJA 2025 DIREKTORAT IPSDH



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
2025



(021) 5730335



ipsdh.pktl@mentlhk.go.id



Direktorat Ipsdh



[dit_ipsdh](https://www.instagram.com/dit_ipsdh)



Direktorat IPSDH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja ini merupakan wujud komitmen Direktorat IPSDH dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang SAKIP dan petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Direktorat IPSDH telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sepanjang Tahun 2025 yang sejalan dengan tujuan dan sasaran Renstra Direktorat IPSDH serta mendukung pencapaian prioritas kinerja Kementerian/Lembaga. Beberapa capaian kinerja yang ditorehkan antara lain peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi sosial, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPSDH, serta koordinasi dan fasilitasi lintas sektor untuk mendukung program pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian ini dicerminkan melalui realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan Direktorat IPSDH.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada data dan bukti kinerja yang akurat serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Direktorat IPSDH.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, baik di internal Direktorat IPSDH maupun mitra kerja eksternal. Semoga Laporan Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan



Jakarta, 20 Januari 2025

Direktur

Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	1
1.2.1 Sumberdaya Manusia.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 RENCANA STRATEGIS	7
2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024	12
2.3 ANGGARAN	13
2.4 PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN KINERJA	22
3.2 EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA	24
3.3 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA	25
3.4 PROGRES CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA 2025-2029	26
3.5 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	28
3.5.1 IKK Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	28
3.5.2 IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	51
3.5.3 IKK Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	57
3.5.4 IKK Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	58
3.6 REALISASI ANGGARAN	59
3.7 PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA	62
3.7.1 Prestasi dan Inovasi.....	62
3.7.2 Branding	63
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 KESIMPULAN	65
4.2 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2025	4
Tabel 2 Sasaran Kegiatan dan IKK Direktorat IPSDH.....	9
Tabel 3 Target Kinerja Direktorat IPSDH 2025-2029	10
Tabel 4 Target Kinerja Direktorat IPSDH 2025-2029	11
Tabel 5 Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2025.....	12
Tabel 6 Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2025	13
Tabel 7 Rincian Anggaran per-KRO Tahun 2025.....	14
Tabel 8 Pagu Efektif Direktorat IPSDH Tahun 2025.....	16
Tabel 9 Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025	17
Tabel 10 Alokasi Anggaran Tahun 2025	17
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Direktorat IPSDHTahun 2025	19
Tabel 12 Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025.....	22
Tabel 13 Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025 (Berdasarkan Rincian Output)	22
Tabel 14 Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025 (Berdasarkan Komponen)	23
Tabel 15 Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	24
Tabel 16 Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2025	25
Tabel 17 Progres Capaian Kinerja 2025 Terhadap Target Renstra 2025-2029.....	27
Tabel 18 Realisasi Pelaksanaan IKK Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	28
Tabel 19 Progres Pelaksanaan IKK Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	28
Tabel 20 Jumlah sampel PSP yang dianalisis periode 2015-2023.....	29
Tabel 21 Kerapatan Tegakan Pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter	30
Tabel 22 Luas Bidang Dasar Tegakan pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter	31
Tabel 23 Volume Tegakan Hutan pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter	32
Tabel 24 Biomassa dan Cadangan Karbon Tegakan Berdiameter 5-up cm	33
Tabel 25 Realisasi pelaksanaan IHN Tahun 2025	35
Tabel 26 Pelayanan Persuratan terkait PIPPIB Tahun 2025	44
Tabel 27 Contoh perbandingan data luas hutan Indonesia berdasarkan kriteria nasional dan kriteria global yang dipergunakan oleh EU (data EU menggunakan data global yang sejalan data GFW).....	49
Tabel 28 Realisasi Pelaksanaan IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya.....	51
Tabel 29 Progres Pelaksanaan IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	52
Tabel 30 21 IGT Lingkup Kementerian Kehutanan	53
Tabel 31 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan yang Belum Tersedia	55
Tabel 32 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan yang Perlu Dimutakhirkan	55
Tabel 33 Matriks Hasil Evaluasi Akuntabilitas Direktorat IPSDH Tahun 2025.....	58
Tabel 34. Hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025	59
Tabel 35 Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja	59
Tabel 36 Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	2
Gambar 2 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	7
Gambar 3 Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2025	16
Gambar 4 Alokasi Anggaran Per-IKK Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024	17
Gambar 5 Pohon Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	21
Gambar 6 Kerapatan tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa	31
Gambar 7 Bidang dasar tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa	32
Gambar 8 Volume tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa	33
Gambar 9 Biomassa dan cadangan karbon tegakan berdiameter 5-up cm di hutan lahan kering dan hutan rawa	34
Gambar 10 Biomassa dan cadangan karbon tegakan berdiameter 5-up cm di hutan mangrove	35
Gambar 11 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2024, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan	38
Gambar 12 Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2024	39
Gambar 13 Gambar Tree Cover loss dari Global Land Analysis and Discovery yang juga dipakai untuk kampanye dan publikasi oleh Global Forest Watch	48
Gambar 14 Buku NSDH Tahun 2025	50
Gambar 15 Rekapitulasi Pelayanan Data hingga Desember 2025	53
Gambar 16 Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2025	62
Gambar 17 Logo Branding Direktorat IPSDH	63
Gambar 18 Beberapa produk yang dikeluarkan Tim Medsos Direktorat IPSDH	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) 2025–2029, yang menandai fase awal dari transformasi kelembagaan dan sistem informasi kehutanan menuju tata kelola berbasis data digital dan integratif. Dalam konteks pembangunan nasional, Direktorat IPSDH berperan penting dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan (SDH) yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan kebijakan, perencanaan ruang, pengendalian deforestasi, serta implementasi program strategis seperti FOLU Net Sink 2030 dan One Map Policy.

Sebagai unit teknis di bawah Ditjen Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH memiliki mandat untuk melaksanakan inventarisasi, pemantauan, dan pengelolaan data spasial kehutanan nasional. Mandat ini memiliki posisi strategis karena kualitas data yang dihasilkan Direktorat IPSDH akan menentukan efektivitas perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan di seluruh sektor kehutanan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Direktorat IPSDH untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai dokumen evaluatif, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi strategis dalam mendukung transformasi tata kelola kehutanan nasional yang berbasis data, transparan, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

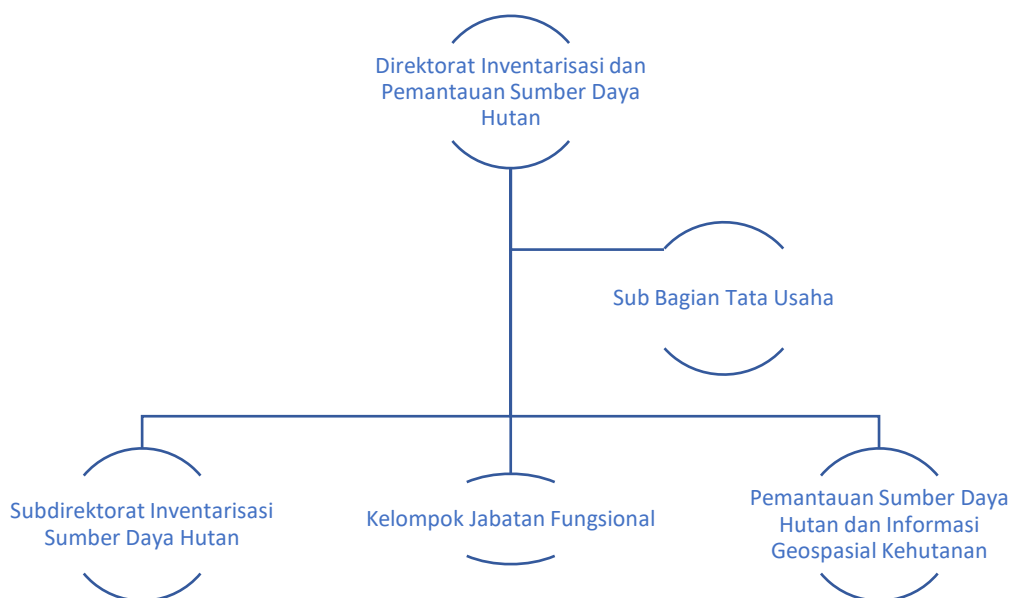
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Di tengah reformasi ini, Direktorat IPSDH mengambil peran yang semakin sentral dan krusial. Tugas utamanya—melakukan inventarisasi hutan, menyediakan data, serta memantau kondisi dan perubahan sumber daya hutan—berubah menjadi enabler utama pelaksanaan UU Cipta Kerja. Di tingkat operasional, penyesuaian organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Kementerian Kehutanan pasca-

Perpres 139/2024 memberikan dukungan penuh. Adapun diagram struktur organisasi dapat terlihat pada Gambar dibawah ini.

Struktur organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 terdiri atas :

1. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan.
2. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial kehutanan.
3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.
4. Jabatan Fungsional



Gambar 1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-20297

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat IPSDH merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IPSDH memiliki fungsi sebagai berikut:



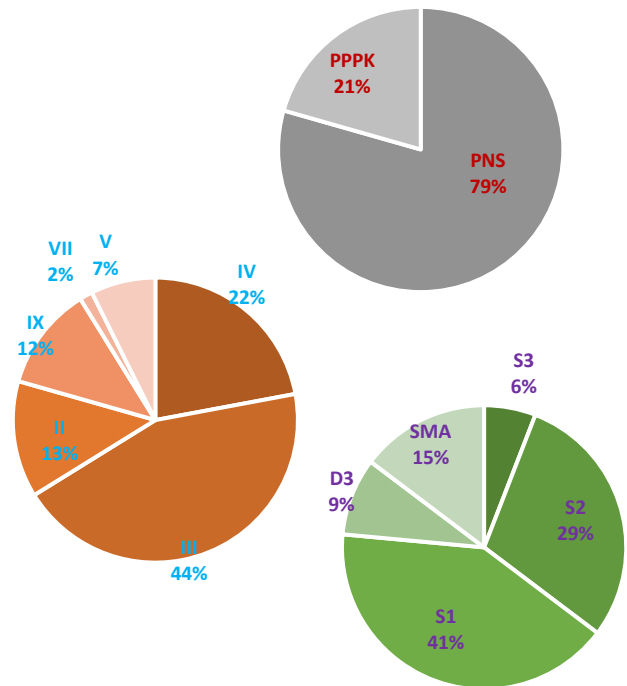
Kedudukan strategis Direktorat IPSDH dalam struktur Ditjen Planologi Kehutanan menempatkannya sebagai penopang utama sistem perencanaan dan pengendalian kehutanan nasional, terutama dalam mendukung keterpaduan data spasial lintas sektor dan lembaga.

1.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia di Direktorat IPSDH merupakan salah satu sumber daya utama (selain infrastruktur); terlebih mengingat bahwa kegiatan Direktorat IPSDH sangat terkait dengan teknologi, informasi serta pengembangan-pengembangan inovasi berbasis keruangan, terutama dalam urusan kehutanan. Pada saat ini, urusan kehutanan sudah cukup lanjut sedangkan proses memahami urusan masih berjalan dan masih perlu terus dikembangkan.

SDM Direktorat IPSDH

Jumlah pegawai lingkup Direktorat IPSDH sampai dengan bulan Desember 2025 berjumlah 68 orang yang terdiri dari 44 pegawai Laki-laki dan 24 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya terdapat 54 PNS (79,4%), 14 PPPK (20,6%), PNS yang terdiri dari 15 Pegawai Golongan IV, 30 Pegawai Golongan III, 9 Pegawai Golongan II, dan PPPK yang terdiri dari 8 Pegawai Golongan IX, 1 Pegawai Golongan VII dan 5 Pegawai Golongan V.



Tabel 1 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2025

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gender		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNPN
1	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	0	1	0	0
2	Subdit Inventarisasi Sumber Daya Hutan	11	12	21	2	0
3	Subdit Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Infomasi Geospasial Kehutanan	24	5	25	4	0
4	Sub Bagian Tata Usaha	8	7	7	8	0
Jumlah		44	24	54	14	0
		68		68		

Memperhatikan beban pekerjaan Direktorat IPSDH yang beragam dan terus berkembang, maka regenerasi dan penambahan tenaga sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kedepan, juga perlu menjadi perhatian, diantaranya melalui penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) yang dinamis.

Terkait hal tersebut sesuai dengan ABK yang disusun, mengingat kebutuhan terkait teknologi dan komputer sangat diutamakan, maka kebutuhan untuk programer juga menjadi sangat penting, Dalam hal ini, urusan dimaksud dicerminkan dalam kebutuhan ABKnya ke depan.

1.3 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, permasalahan, serta kajian SWOT, terdapat isu strategis pada direktorat IPSDH yaitu Ketidakepadanan data spasial antarinstansi akibat perbedaan standar, format, metodologi, dan waktu pemutakhiran menimbulkan bias dalam analisis, melemahkan kepastian hukum kawasan hutan, serta menghambat implementasi *Kebijakan Satu Peta*. Kondisi ini meningkatkan potensi tumpang tindih klaim lahan dan mengurangi efektivitas perencanaan serta pengawasan.

Disamping itu terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat IPSDH antara lain:

1. Reorganisasi Kemenhut

Adanya reorganisasi KLHK yang dimandatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan yaitu pemisahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan

- i. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat IPSDH bersifat khusus, karena jenis pekerjaannya beragam dan tidak monoton serta sangat berkaitan dengan teknologi dan inovasi.

1. Mengingat perannya sebagai Walidata Geospasial LHK, maka SDM yang sangat terkait dengan basis data dan urusan Teknologi Informasi (TI) amat sangat diperlukan;
 2. Mengingat perannya dalam inventarisasi hutan secara terrestrial dan non-terrestrial, maka pengembangan SDM yang terkait urusan survey dan pemetaan, menjadi sangat penting. Dalam hal ini optimalisasi jabatan fungsional Survey dan Pemetaan (Surta) perlu menjadi prioritas.

- ii. Keberlangsung Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Inventarisasi hutan adalah dasar dari segala kebijakan di sektor kehutanan, untuk itu penguatan urusan inventarisasi harus terus menjadi prioritas. Bagian inventarisasi tidak boleh menjadi tempelan atau tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan SDH. Untuk itu, jaminan bahwa anggaran IHN tidak menjadi bagian yang paling mudah dipotong, harus dikomitmenkan;

iii. Data nasional versus data global

Pemahaman tentang bagaimana data nasional dibangun dan perbedaan serta masalahnya apabila disamakan dengan data global, adalah hal sangat penting. Jangan sampai ketidakpahaman terhadap data nasional, membuat data nasional tidak ada kekuatannya melawan data global.

iv. Keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial LHK

Pada saat ini KLHK adalah salah satu Kementerian terdepan yang telah berhasil menyelenggarakan tata kelola data dan informasi geospasial secara baik dan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, jaminan pengelola data dan informasi geospasial KLHK memahami peran tersebut dan terus mengembangkannya sesuai dengan peta jalan yang telah dibangun, perlu dipertahankan dan bahkan dikembangkan.

v. Urgensi valuasi sumber daya hutan

Tahapan yang paling penting setelah mengoptimalkan inventarisasi hutan adalah tentang membangun metode valuasi sumber daya hutan. Saat ini valuasi SDH yang ada belum berhasil mencerminkan peran SDH yang tangible. Jasa ekosistem yang lebih banyak dikembangkan adalah terkait isu carbon. Padahal peran SDH tidak hanya terbatas pada carbon, namun lebih dari itu.

vi. Keberlanjutan pembangunan zona integritas

Pembangunan ZI bukanlah hanya untuk memenuhi target-target RB, namun sesungguhnya adalah untuk bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif, efisien dan optimal. Terkait hal ini, maka pembangunan ZI perlu terus dilanjutkan. Evaluasi terhadap kurang berhasilan evaluasi WBBM perlu dilakukan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penilaian untuk WBBM. Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Kemenhut dan PANRB untuk mendapatkan evaluator yang lebih memahami peran pelayanan Informasi Geospasial, perlu dilakukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

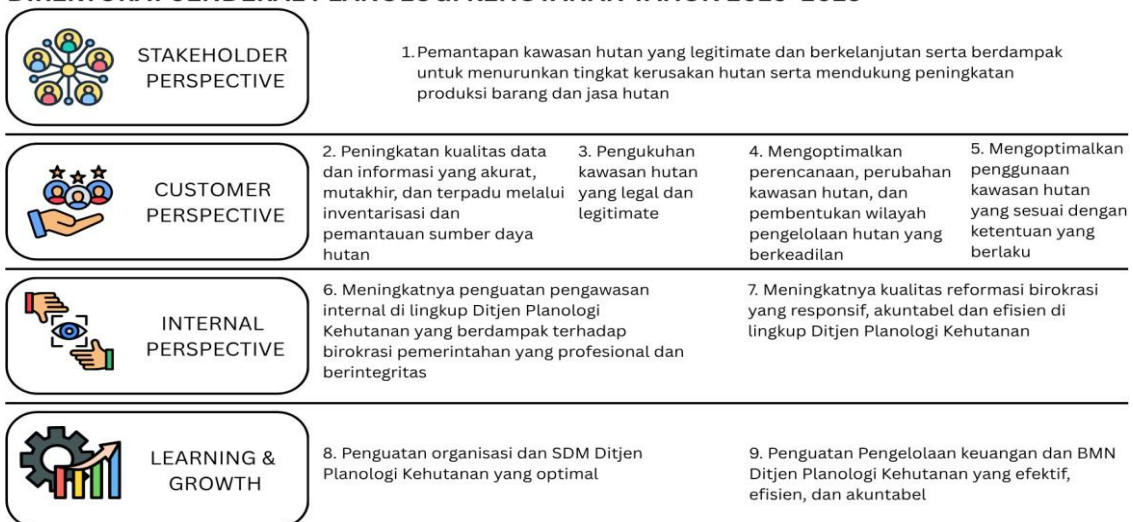
2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” Kementerian Kehutanan menetapkan visi pembangunan sektor kehutanan untuk periode 2025–2029 sebagai berikut: “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”,

Visi tersebut diatas menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna mendukung transformasi menuju ekonomi hijau nasional dalam menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pengelolaan kawasan hutan diorientasikan bukan hanya pada kelestarian ekologis, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah ekonomi dan penguatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, hutan diposisikan sebagai entitas tapak pembangunan nasional yang mengalirkan manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang. Untuk mewujudkan arah tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan visi turunan yaitu “Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial.”

PETA STRATEGI

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2025–2029



Gambar 2 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

Sebagai pelaksana teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Direktorat IPSDH mendukung visi diatas dengan upaya peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Hal ini terdiskripsikan pada peta strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029.

Berpedoman pada prioritas nasional, serta berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Kementerian Kehutanan merumuskan misi pembangunan kehutanan sebagai berikut:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Keempat misi tersebut menjadi kerangka strategis Renstra Kementerian Kehutanan 2025–2029 dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam menetapkan rencana aksi dan program operasionalnya, termasuk bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang memiliki mandat dalam perencanaan, penataan, dan pemantauan kawasan hutan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan merumuskan misi sebagai berikut:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, misi Kementerian Kehutanan dan Ditjen Planologi Kehutanan memiliki keselarasan strategis dengan arah pembangunan nasional, serta menjadi dasar bagi Direktorat IPSDH untuk mengacu misi diatas dalam memperkuat sistem

data, informasi, dan pemantauan sumber daya hutan yang menjadi dasar untuk kebijakan kehutanan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Sasaran Program Ditjen Planologi Kehutanan maka kegiatan dan sasaran kegiatan yang berada dalam lingkup Direktorat IPSDH sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Kegiatan dan IKK Direktorat IPSDH

Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.1.SP3.1 Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1 Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)
	T1.SS1.1.SP3.1 Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan			T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2 Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan
				T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3 Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya
Program Dukungan Manajemen				
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	7314. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan		T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Pada Direktorat IPSDH terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;

Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memantau kondisi sumber daya hutan secara akurat dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data tentang jenis-jenis pohon, luas hutan, kondisi ekosistem, dan potensi hasil hutan, serta pemantauan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan. Melaluisistem informasi geospasial dan teknologi penginderaan jauh, inventarisasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan akurat terhadap perubahan yang terjadi, seperti deforestasi, dan degradasi hutan. Kegiatan ini juga mendukung perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data dan dapat mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tugas pokok pada Direktorat IPSDH, yaitu:

1. Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit);
2. Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; dan
3. Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya.

Tabel 3 Target Kinerja Direktorat IPSDH 2025-2029

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan: 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan										
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		Pusat						Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Persen		0	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Persen		100	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Persen		100	100	100	100	100	

2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, efisien, dan akuntabel. SPIP berperan dalam mengendalikan risiko dan menjaga integritas proses, sementara SAKIP memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan SPIP dan SAKIP, Direktorat IPSDH dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
2. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Tabel 4 Target Kinerja Direktorat IPSDH 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Dukungan Manajemen									
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan									
T4.SS4.SP1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat					Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		3,9	3,9	3,9	3,9	
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan									
T4.SS4.SP2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan		Pusat					Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		84	84	84	84	

Adapun target capaian Kinerja Kegiatan dalam Renstra 2020-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2025

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		Pusat					
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Persen		0	100	100	100	100
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik							
RO	Rincian Output	005 - Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	Dokumen		0	1	1	1	1
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Persen		100	100	100	100	100
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik							
RO	Rincian Output	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	Dokumen		7	7	7	7	7
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Persen		100	100	100	100	100
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik							
RO	Rincian Output	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	Dokumen		160	160	160	160	160
Program: Dukungan Manajemen									
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan									
T4.SS4.SP1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							
T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
T4.SS4.SP2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan							
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		84	84	84	84	84

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan utama pembangunan planologi kehutanan 2020-2025, kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025 mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
2. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

Secara rinci rencana kegiatan tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6 Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	
143.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen
		Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Layanan
143.WA Program Dukungan Manajemen	7314- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan
		Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		994-Layanan Perkantoran	1	Layanan
Jumlah						

2.3 ANGGARAN

2.3.1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Dalam kerangka Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, anggaran tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai core business penyediaan data kehutanan nasional. Program ini mendukung langsung sasaran penurunan emisi GRK, perlindungan ekosistem hutan, serta penyediaan data dasar bagi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan.

a. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional

Untuk mendukung tersedianya analisis yang komprehensif dan berkelanjutan, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.900.000.000 (dalam ribu) untuk menghasilkan 6 dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pengolahan data, analisis perubahan kondisi hutan, penyusunan laporan tematik, serta penyajian informasi yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Output ini menjadi kelanjutan dari baseline dan time

series data yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

b. Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

Untuk memperkuat pemanfaatan data kehutanan, dialokasikan anggaran sebesar Rp6.500.000.000 guna menyediakan 1 layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan. Layanan ini mendukung keterpaduan data spasial kehutanan dengan sistem informasi nasional, meningkatkan aksesibilitas data bagi pemangku kepentingan, serta memperkuat fungsi pelayanan publik berbasis data yang akurat dan mutakhir.

2.3.2 Program Dukungan Manajemen

Selain kegiatan teknis, rencana anggaran tahun 2025 juga mencakup Program Dukungan Manajemen, yang berfungsi menjamin kelancaran operasional, tata kelola organisasi, dan akuntabilitas kinerja.

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dalam rangka mendukung peningkatan Nilai SAKIP dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dialokasikan anggaran sebesar Rp243.000.000 untuk 1 layanan umum dukungan manajemen internal. Anggaran ini digunakan untuk mendukung perencanaan kinerja, pelaporan, evaluasi, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

c. Layanan Perkantoran

Untuk mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran, dialokasikan anggaran sebesar Rp590.000.000 untuk 1 layanan perkantoran. Anggaran ini menjamin terselenggaranya kegiatan administrasi dan dukungan logistik yang diperlukan agar seluruh kegiatan teknis dapat berjalan efektif dan efisien.

Adapun rincian anggaran per-KRO sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Anggaran per-KRO Tahun 2025

Uraian		Jumlah
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN		10.163.000.000
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	9.330.000.000
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9.330.000.000
7264.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	9.330.000.000

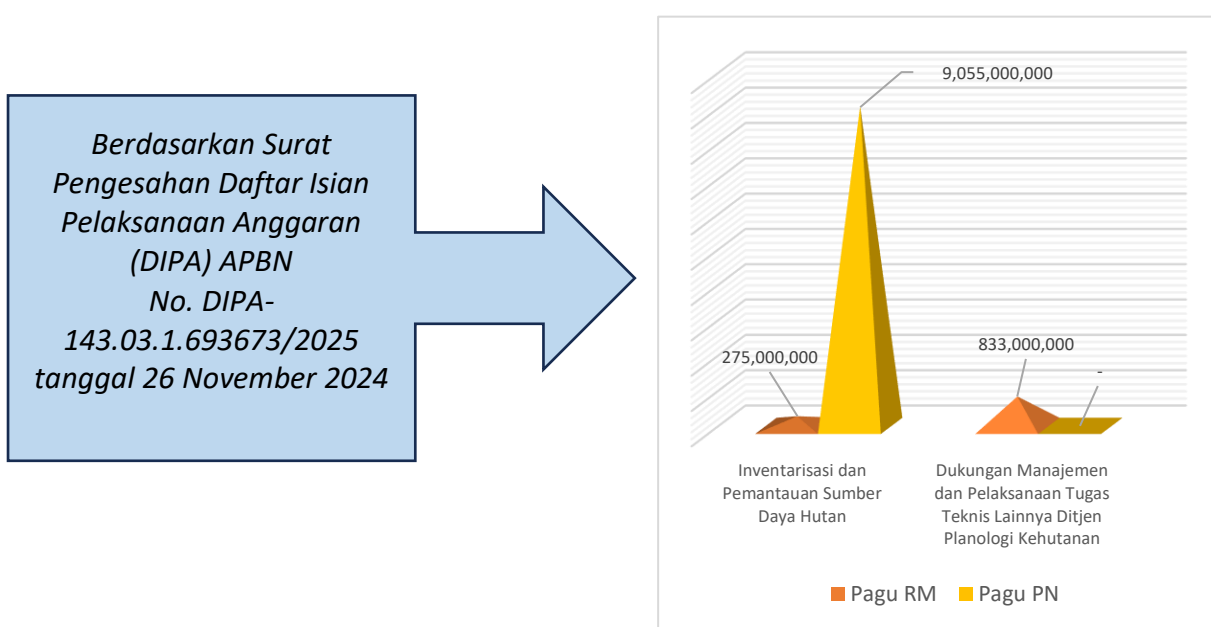
	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
7264.BMA.001	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	2.830.000.000
051	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	375.000.000
052	Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	390.000.000
053	Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	475.000.000
054	Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1.160.000.000
055	Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	430.000.000
7264.BMA.004	Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	6.500.000.000
051	Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik LHK	6.000.000.000
052	Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	500.000.000
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	833.000.000
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	833.000.000
7314.EBA.962	Layanan Umum	243.000.000
061	Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	243.000.000
7314.EBA.994	Layanan Perkantoran	590.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	590.000.000

Secara keseluruhan, rencana anggaran tahun 2025 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kesinambungan. Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan target output dan indikator kinerja kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur manfaat dan dampaknya. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mendukung perlindungan hutan, penurunan emisi GRK, serta penguatan tata kelola kehutanan berbasis data.

Dengan struktur anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel, rencana anggaran tahun 2025 diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, meningkatkan kualitas data dan analisis kehutanan, serta memperkuat layanan informasi geospasial dan tata kelola organisasi. Anggaran ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan capaian tahun sebelumnya dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan secara berkelanjutan.

Tabel 8 Pagu Efektif Direktorat IPSDH Tahun 2025

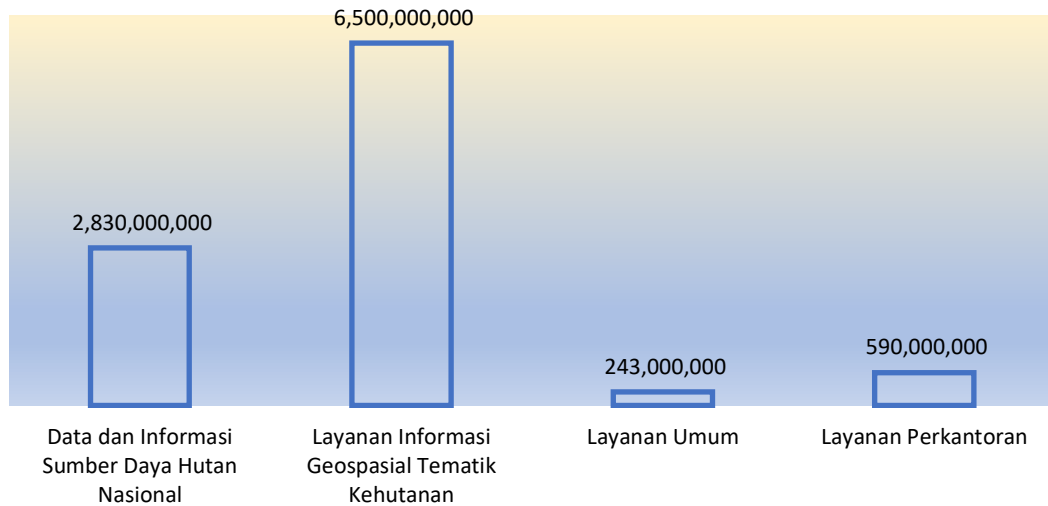
Program	Kegiatan	Pagu		Jumlah Pagu
		RM	PN	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp 650.000.000	Rp 16.250.000.000	Rp 16.900.000.000
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Rp 995.000.000	Rp -	Rp 995.000.000
Total Pagu				Rp 17.895.000.000
Efisiensi Belanja sesuai Inpres No.1/2025				-Rp 7.732.000.000
Pagu Anggaran yang dapat digunakan				Rp 10.163.000.000



Total Pagu Tahun 2025 telah dikurangi Efisiensi Belanja sesuai Inpres No.1/2025 sebesar Rp7.195.000.000,-



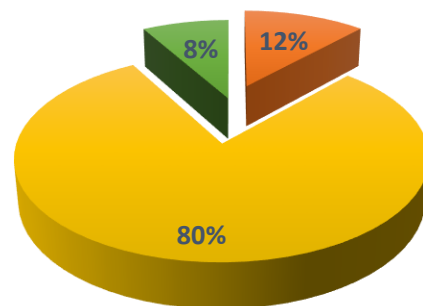
Gambar 3 Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2025



Gambar 4 Alokasi Anggaran Per-IKK Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

Tabel 9 Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025

SUB DIT./ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN2025
Subdit ISDH	1.195.000.000
Subdit PSDH & IGK	8.135.000.000
Sub Bagian Tata Usaha	833.000.000
Jumlah	10.163.000.000



■ Subdit ISDH ■ Subdit PSDH & IGK ■ Sub Bagian Tata Usaha

Tabel 10 Alokasi Anggaran Tahun 2025

IKK	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen	
		051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	375,000,000
		052- Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen	390,000,000
		053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian	2	Dokumen	475,000,000

IKK	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya		Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			
		054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	1,160,000,000
		055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	430,000,000
		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	layanan	
		051-Penguatan penyelenggaraan sistem informasi geospasial tematik Kehutanan	1	sistem	6,000,000,000
		052-Penguatan pengelolaan dan layanan informasi geospasial tematik Kehutanan	1	Layanan	500,000,000
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	
		061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Layanan	243.000,000
		994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	590.000,000

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Direktorat IPSDHTahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran / Peran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	1.1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	1.1.1 Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100%
			1.1.2 Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100%

Customer Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	2.1 Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	2.1.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6 Dok
		2.2 Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	2.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	160 Dok

Internal Process

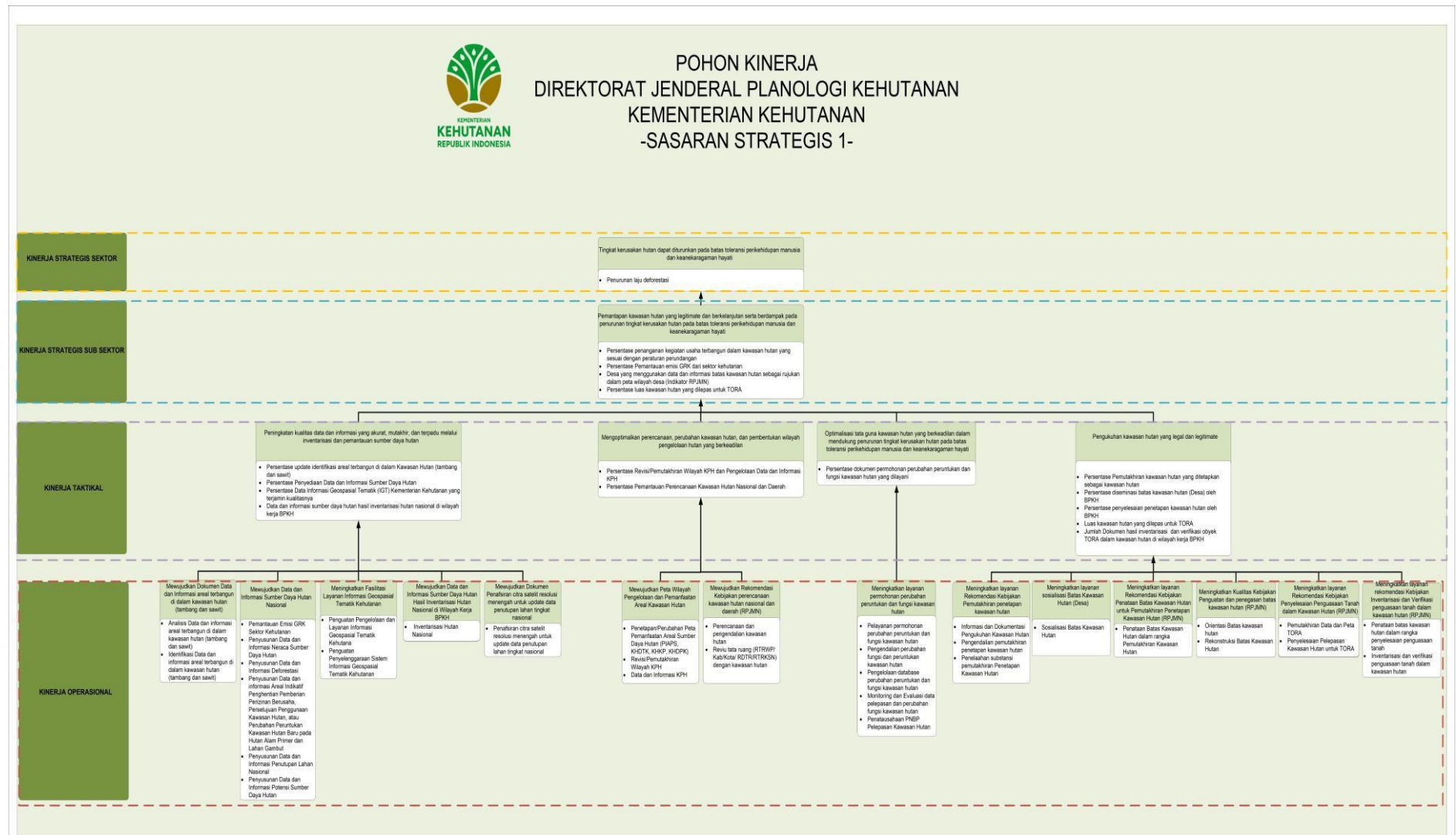
No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	3.1 Nilai Maturitas SPIP Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3,9 Poin

No.	Sasaran / Peran	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
4	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	4.1	Nilai SAKIP Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	84 Poin

Learning and Growth

No.	Sasaran / Peran	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
5	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	5.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	81 Poin
6	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	6.1	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen

Gambar 5 Pohon Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kegiatan dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2025. Mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, Renja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 maka kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2025 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025

Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	Capaian %
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100%	6 Dokumen	100
	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100%	1 Layanan	100
	Nilai maturitas SPIP Direktorat IPSDH	3,9	3,9	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP pada Direktorat IPSDH	84	77,59	92,36
Capaian 2025				98,09

Tabel 13 Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025
(Berdasarkan Rincian Output)

IKK	KRO	RO	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6 Dokumen	6 Dokumen	100
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan	100
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Tabel 14 Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025 (Berdasarkan Komponen)

IKK	KRO	RO/KOMPONEN	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6 Dokumen	6 Dokumen	100
		051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		052- Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan	100
		051-Penguatan penyelenggaraan sistem informasi geospasial tematik Kehutanan	1 Sistem	1 Sistem	100
		052-Penguatan pengelolaan dan layanan informasi geospasial tematik Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan	100
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
		994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100

3.2 EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2025 suatu output dengan persentase capaian kinerja tahun 2024. Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dibandingkan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 15 Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK	Capaian %		Efektifitas
		2024	2025	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
<i>Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH</i>	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	100	-	-
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	100	-	-
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	100	-	-
	Data dan informasi deforestasi	100	-	-
<i>Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK</i>	Layanan Informasi Geospasial Geospasial Tematik LHK	100	-	-
<i>Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan</i>	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan		100	-
	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya		100	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				-
<i>Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	100	-	-
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	-	-
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	100	-	-

<i>Kegiatan / Sasaran Kegiatan</i>	IKK	Capaian %		Efektifitas
		2024	2025	
<i>Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	-	-
<i>Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas</i>	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	-	100	-
<i>Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan</i>	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	-	100	-

3.3 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16 Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2025

<i>Program/ Kegiatan</i>	<i>KRO /RO</i>	<i>Komponen</i>	<i>Target 2025</i>	<i>Capaian Fisik Tahun 2024</i>	<i>% Capaian Keuangan Tahun 2025</i>	<i>Efisiensi</i>
<i>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</i>				100.00	99.93	0.07
<i>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>				100.00	99.93	0.07
		Data dan Informasi Publik[Base Line]		100.00	99.93	0.07
		Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6 Dokumen	100.00	99.96	0.04
		Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	100.00	99.99	0.01
		Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1 Dokumen	100.00	99.93	0.07
		Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,	2 Dokumen	100.00	99.93	0.07

<i>Program/ Kegiatan</i>	<i>KRO /RO</i>	<i>Komponen</i>	<i>Target 2025</i>	<i>Capaian Fisik Tahun 2024</i>	<i>% Capaian Keuangan Tahun 2025</i>	<i>Efisiensi</i>
		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut				
		Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1 Dokumen	100.00	99.95	0.05
		Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	100.00	100.00	0.00
		Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1 Layanan	100.00	99.92	0.08
		Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Sistem	100.00	99.97	0.03
		Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Layanan	100.00	99.36	0.64
<i>Program Dukungan Manajemen</i>				100.00	99.95	0.05
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan</i>				100.00	99.95	0.05
		Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]		100.00	99.95	0.05
		Layanan Umum	1 Layanan	100.00	99.97	0.03
		Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Layanan	100.00	99.97	0.03
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	100.00	99.95	0.05
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100.00	99.95	0.05
				100.00	99.93	0.07

Dari hasil analisa efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan antara capaian fisik dan capaian realisasi keuangan didapatkan nilai 0,07. Hal ini berarti bahwa capaian fisik lebih besar dibandingkan capaian realisasi keuangan dan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian output.

3.4 PROGRES CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA 2025-2029

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Data Hutan telah sejalan dengan Renstra 2025-2029, hal tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 17 Progres Capaian Kinerja 2025 Terhadap Target Renstra 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Renstra 2025-2029	Realisasi per-tahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2025	2026	2027	2028	2029		
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan							
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	100 Persen	0				0	0
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik							
RO	Rincian Output	005 - Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	4 Dokumen	0				0 Dokumen	-
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 Persen	100				100 Persen	100
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik							
RO	Rincian Output	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	35 Dokumen	6				6 Dokumen	17,14
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 Persen	100				100 Persen	100
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik							
RO	Rincian Output	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	800 Dokumen	214				214 Dokumen	26,75
Program: Dukungan Manajemen									
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan									
T4.SS4.SP1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							
T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 Poin	3,9				3,9 Poin	100
T4.SS4.SP2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan							
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin	77,59				77,59 Poin	92,36

3.5 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), hampir seluruh kegiatan rinci tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut:

3.5.1 IKK *Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan*

Tabel 18 Realisasi Pelaksanaan IKK *Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan*

Sasaran Kegiatan	IKK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6 Dokumen	6 Dokumen	100

Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) *Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan*, telah ditetapkan target sebanyak 6 (enam) dokumen data dan informasi sumber daya hutan. Seluruh target tersebut berhasil dipenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi sumber daya hutan telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu, serta mendukung ketersediaan data yang andal sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan di sektor kehutanan.

Tabel 19 Progres Pelaksanaan IKK *Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan*

KEGIATAN	IKK	KRO	RO	TAHUN 2025		Output
				Target	Realiasi	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya	Data dan Informasi Publik	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan	6 Dokumen	6 Dokumen	1. Buku Statistik Penutupan Lahan Tahun 2024 (Buku Rekalkulasi) 2. SK PIPPIB Tahun

KEGIATAN	IKK	KRO	RO	TAHUN 2025		Output
				Target	Realiasi	
	Hutan		Kawasan Hutan			2025 (Periode I) No. SK 554. 3. SK PIPPIB Tahun 2025 (Periode II) No. SK 6156 4. Buku Pemantauan Deforestasi Tahun 2024 5. Buku Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2024 6. Buku Potensi Sumber Daya Hutan 2024

3.5.1.1 Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan

Tahun 2025 telah dilakukan analisa data IHN periode 2015-2023 sebanyak 1171 plot untuk mendapatkan potensi sumber daya hutan Indonesia. Data IHN tersebut tersebar di Hutan Lahan Kering, Hutan Rawa dan Hutan Mangrove dengan rincian seperti pada tabel berikut.

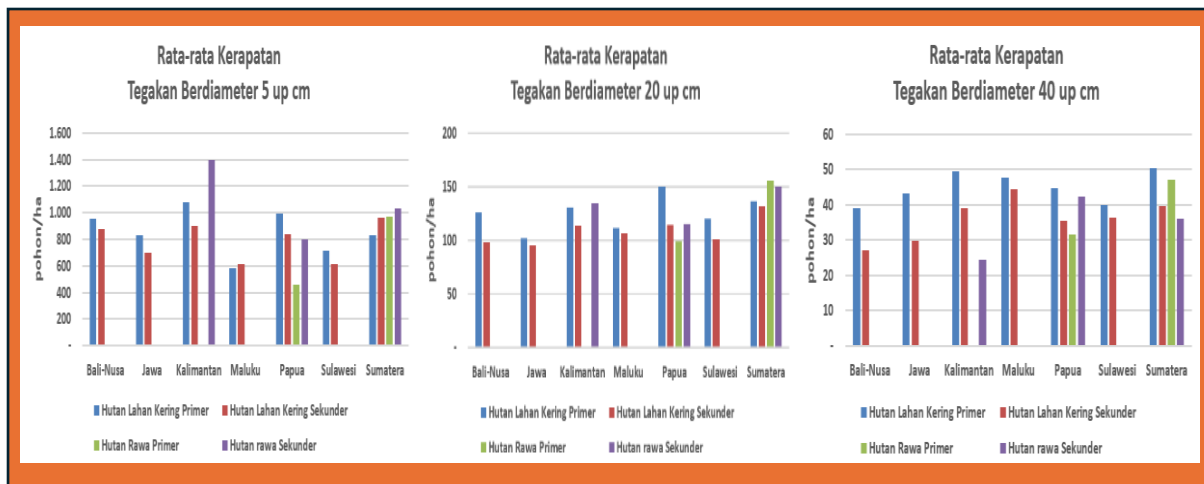
Tabel 20 Jumlah sampel PSP yang dianalisis periode 2015-2023

Tipe lahan	Pulau	Jumlah PSP
Lahan kering	Bali-Nusa	94
	Jawa	71
	Kalimantan	130
	Maluku	57
	Papua	101
	Sulawesi	212
	Sumatera	268
Rawa	Bali-Nusa	-
	Jawa	-
	Kalimantan	12
	Maluku	-
	Papua	10
	Sulawesi	-
	Sumatera	20
Mangrove	Bali-Nusa	8
	Jawa	5
	Kalimantan	77
	Maluku	12
	Papua	33
	Sulawesi	17
	Sumatera	44
Jumlah		1171

Analisis data IHN dilakukan untuk mendapatkan potensi sumberdaya hutan pada kawasan hutan di tujuh pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Informasi potensi sumberdaya hutan mencakup kerapatan tegakan, bidang dasar tegakan, volume tegakan, biomassa tegakan, dan cadangan karbon tegakan dikelompokkan dalam 3 tipe lahan yaitu hutan lahan kering, hutan rawa dan hutan mangrove. Potensi sumber daya hutan tersebut tersaji dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 21 Kerapatan Tegakan Pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Kerapatan Tegakan (pohon/ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	951	126	39
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	875	98	27
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	835	102	43
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	700	95	30
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	1.078	131	49
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	898	113	39
	Hutan Rawa Sekunder	12	1.400	135	24
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	584	111	48
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	613	107	45
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	994	150	45
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	838	115	35
	Hutan Rawa Primer	5	457	99	32
	Hutan Rawa Sekunder	5	801	115	42
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	718	120	40
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	616	101	36
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	832	136	50
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	960	131	40
	Hutan Rawa Primer	2	na	na	na
	Hutan Rawa Sekunder	18	1.030	149	36
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	845	130	44
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	809	112	37
	Hutan Rawa Primer	7	604	115	36
	Hutan Rawa Sekunder	35	1.124	139	33

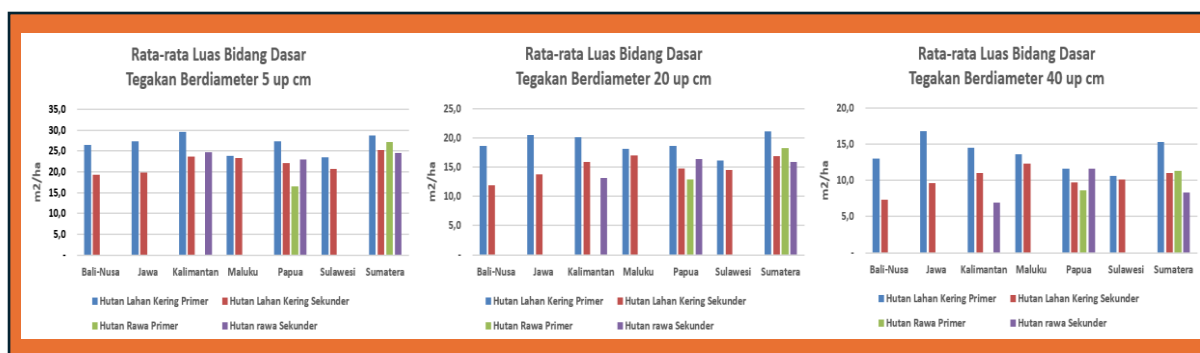


Gambar 6 Kerapatan tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa

Tabel 22 Luas Bidang Dasar Tegakan pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Luas Bidang Dasar (m ² /ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	26,5	18,6	13,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	19,2	11,9	7,3
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	27,3	20,5	16,8
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	19,8	13,8	9,7
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	29,5	20,1	14,5
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	23,6	15,9	11,0
	Hutan Rawa Sekunder	12	24,7	13,2	7,0
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	23,8	18,1	13,6
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	23,3	17,0	12,3
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	27,3	18,7	11,6
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	22,1	14,7	9,7
	Hutan Rawa Primer	5	16,5	12,9	8,6
	Hutan Rawa Sekunder	5	23,0	16,3	11,6
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	23,5	16,1	10,6
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	20,7	14,5	10,1
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	28,6	21,1	15,3
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	25,2	16,9	11,1
	Hutan Rawa Primer	2	na	na	Na
	Hutan Rawa Sekunder	18	24,6	15,9	8,4
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	26,4	18,7	12,9

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Luas Bidang Dasar (m ² /ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	22,8	15,5	10,5
	Hutan Rawa Primer	7	19,6	14,5	9,4
	Hutan Rawa Sekunder	35	24,7	15,3	8,4

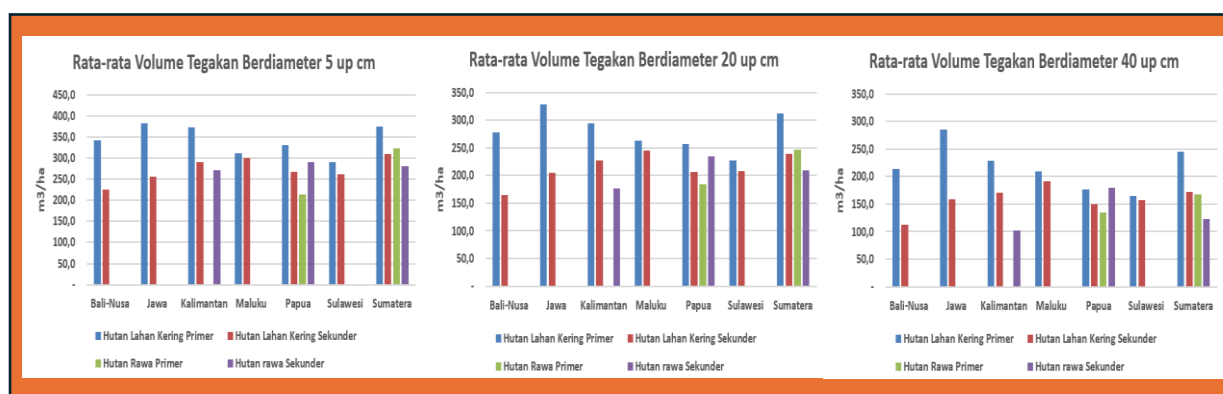


Gambar 7 Bidang dasar tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa

Tabel 23 Volume Tegakan Hutan pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Volume Tegakan (m ³ /ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	342,8	277,5	213,7
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	225,9	165,0	112,7
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	383,2	328,0	286,1
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	255,0	205,6	158,4
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	372,4	293,7	229,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	290,4	226,9	170,7
	Hutan Rawa Sekunder	12	271,7	177,1	101,8
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	311,2	263,0	210,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	300,1	244,9	191,0
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	330,2	257,9	177,3
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	268,3	206,3	149,5
	Hutan Rawa Primer	5	214,3	184,3	135,1
	Hutan Rawa Sekunder	5	290,6	235,0	180,1
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	290,9	227,6	164,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	261,0	207,7	157,8
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	375,5	311,8	245,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	308,9	239,6	172,3

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Volume Tegakan (m ³ /ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Indonesia	Hutan Rawa Primer	2	na	na	na
	Hutan Rawa Sekunder	18	281,6	209,2	122,8
	Hutan Lahan Kering Primer	362	336,5	271,2	204,9
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	280,5	220,0	163,5
	Hutan Rawa Primer	7	245,1	202,2	144,5
	Hutan Rawa Sekunder	35	279,5	201,8	123,8

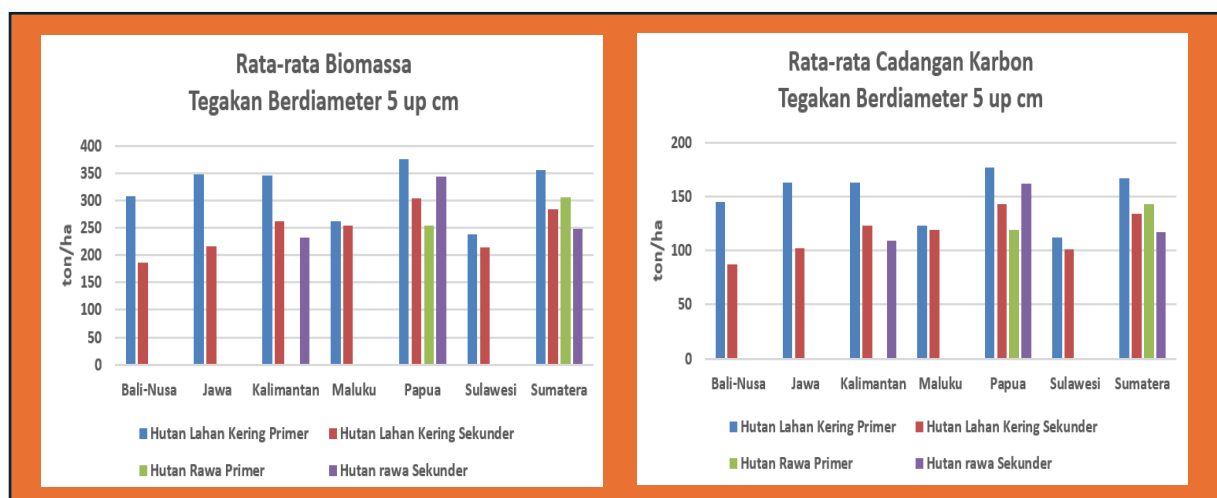


Gambar 8 Volume tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa

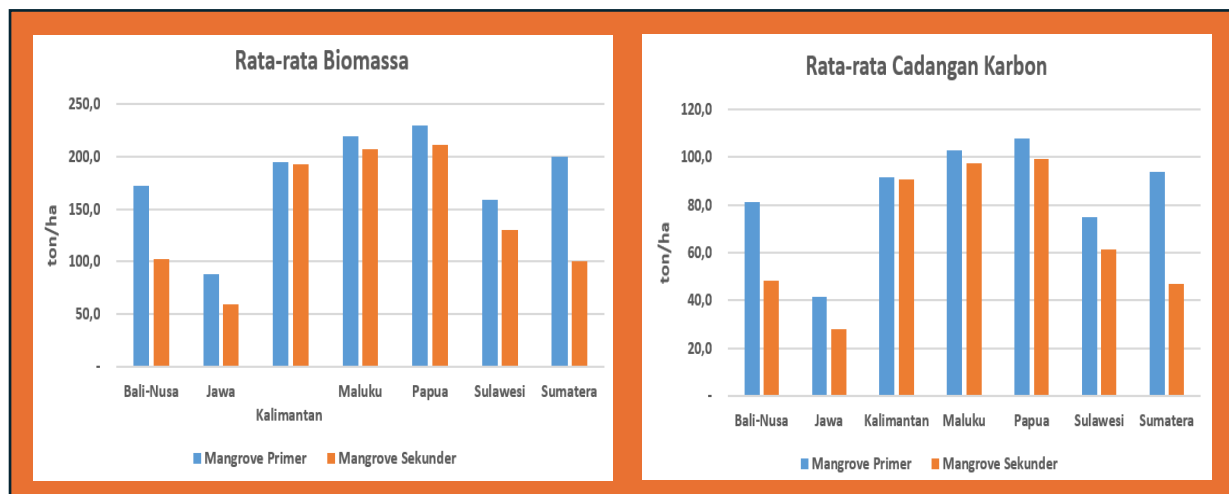
Tabel 24 Biomassa dan Cadangan Karbon Tegakan Berdiameter 5-up cm

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Biomassa (ton/ha)	Cadangan karbon (ton/ha)
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	308,4	145,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	185,5	87,2
	Hutan Mangrove Primer	4	172,5	81,1
	Hutan Mangrove sekunder	4	102,6	48,2
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	347,8	163,5
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	217,3	102,1
	Hutan Mangrove Primer	2	NA	NA
	Hutan Mangrove sekunder	3	59,7	28,1
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	346,7	163,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	263,0	123,6
	Hutan Rawa Sekunder	12	232,1	109,1
	Hutan Mangrove Primer	4	194,8	91,6
	Hutan Mangrove sekunder	73	192,8	90,6
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	261,6	123,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	253,7	119,2
	Hutan Mangrove Primer	9	219,1	103,0

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Biomassa (ton/ha)	Cadangan karbon (ton/ha)
Papua	Hutan Mangrove sekunder	3	207,4	97,5
	Hutan Lahan Kering Primer	51	375,9	176,7
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	304,2	143,0
	Hutan Rawa Primer	5	253,6	119,2
	Hutan Rawa Sekunder	5	344,4	161,9
	Hutan Mangrove Primer	18	229,4	107,8
	Hutan Mangrove sekunder	15	210,9	99,1
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	238,9	112,3
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	214,7	100,9
	Hutan Mangrove Primer	5	158,9	74,7
	Hutan Mangrove sekunder	12	130,2	61,2
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	355,6	167,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	284,6	133,8
	Hutan Rawa Primer	2	NA	NA
	Hutan Rawa Sekunder	18	249,2	117,1
	Hutan Mangrove Primer	18	199,6	93,8
	Hutan Mangrove sekunder	26	100,0	47,0
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	312,6	146,9
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	252,5	118,7
	Hutan Rawa Primer	7	268,3	126,1
	Hutan Rawa Sekunder	35	256,9	120,8
	Hutan Mangrove Primer	60	202,2	95,0
	Hutan Mangrove sekunder	136	166,3	78,2



Gambar 9 Biomassa dan cadangan karbon tegakan berdiameter 5-up cm di hutan lahan kering dan hutan rawa



Gambar 10 Biomassa dan cadangan karbon tegakan berdiameter 5-up cm di hutan mangrove

Realisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional Tahun 2025

Tabel 25 Realisasi pelaksanaan IHN Tahun 2025

BPKH	DIPA	M4CR	Total
BPKH 01	9	39	48
BPKH 02	4	6	10
BPKH 03	4	6	10
BPKH 04	10	84	94
BPKH 05	2	4	6
BPKH 06	5	0	5
BPKH 07	18	6	24
BPKH 08	4	2	6
BPKH 09	5	6	11
BPKH 10	10	0	10
BPKH 11	9	0	9
BPKH 12	2	4	6
BPKH 13	5	3	8
BPKH 14	8	4	12
BPKH 15	2	3	5
BPKH 16	18	6	24

BPKH	DIPA	M4CR	Total
BPKH 17	4	4	8
BPKH 18	3	0	3
BPKH 19	5	46	51
BPKH 20	12	2	14
BPKH 21	7	0	7
BPKH 22	4	0	4
Grand Total	150	225	375

Pada Tahun 2025, target pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) ditetapkan sebanyak 365 klaster. Dalam pelaksanaannya, seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, realisasi kegiatan IHN yang bersumber dari anggaran DIPA hanya dapat dilaksanakan sebanyak 150 klaster. Untuk memastikan tetap tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memperoleh dukungan pendanaan Non-DIPA melalui program M4CR, yang memungkinkan tambahan pelaksanaan IHN sebanyak 225 klaster.

Dengan adanya dukungan pendanaan tersebut, total realisasi pelaksanaan IHN pada Tahun 2025 mencapai 375 klaster. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja pelaksanaan IHN Tahun 2025 tercatat sebesar 102 persen.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan IHN tetap dapat berjalan secara optimal dan adaptif terhadap keterbatasan anggaran, serta mencerminkan efektivitas sinergi pendanaan dalam mendukung pemenuhan target kinerja Direktorat IPSDH.

BENCHMARKING INVENTARISASI HUTAN NASIONAL TAHUN 2025

1. *Forest data without borders: Asia Pacific knowledge exchange on National Forest Inventories*

- a. *FAO menyelenggarakan workshop “a Regional Exchange on National Forest Inventories in the Asia Pasific” di Bangkok, Thailand pada tanggal 25-27 Maret 2025***
- b. *Tujuan dari kegiatan workshop sebagaimana butir 1 adalah***
 - a. *Mengkaji status dan karakteristik Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) di Negara-Negara Asia Pasifik;***

- b. Memperkenalkan metode terkini dan alat-alat yang digunakan untuk pengaplikasian IHN dari pengalaman dari FAO dan negara-negara lain;
 - c. Diskusi peran IHN dalam meningkatkan transparansi data terkait kehutanan;
 - d. Membangun jaringan negara-negara pelaksana IHN di tingkat regional Asia Pasifik khususnya dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
2. *Global Forest Observation Initiatives (GFOI) Global Forest Observation Initiatives (GFOI)*
- a. GFOI merupakan kemitraan yang mengkoordinasikan pemberian dukungan internasional untuk meningkatkan pemantauan hutan di negara-negara tropis, dengan menyatukan donor utama, negara, dan mitra pembangunan di sektor pemantauan hutan. Setiap dua tahun, GFOI menyelenggarakan Pertemuan Pleno (Plenary Meeting) pertemuan global utama bagi sektor pemantauan hutan untuk mengembangkan komunitas, membangun kemitraan, dan bertukar pengetahuan. Pertemuan ini menyoroti peran kerja sama internasional dalam memajukan pemantauan hutan di negara-negara tropis untuk pengelolaan hutan yang lebih baik, pelestarian alam, aksi iklim, dan kebutuhan lainnya.
 - b. Tujuan utama dari sidang pleno ini adalah peluncuran *Global Forest Resources Assessment (FRA) 2025*, sebuah evaluasi otoritatif terhadap kondisi, luas, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan dunia dari waktu ke waktu ditambah dengan presentasi kondisi monitoring hutan, inventarisasi hutan dan karbon.
 - c. Pelaksana utama kegiatan GFOI adalah FAO Headquarte Roma dengan Co-Organizer diantaranya Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2025, berlokasi di Hotel Grand Hyatt, Bali Indonesia dan secara daring. Adapun agenda utama kegiatan GFOI adalah sidang pleno (Plenary Meetings) dan disertai dengan side event (agenda GFOI 2025 terlampir).
 - d. Tema sidang pleno GFOI tahun 2025 adalah "The Marvel Of Forest Monitoring", dimana akan banyak diskusi yang berfokus pada bagaimana komunitas GFOI dapat memperkuat hubungan antar forum pemantauan hutan. Peserta sidang pleno dan side event GFOI berasal dari negara-negara yang

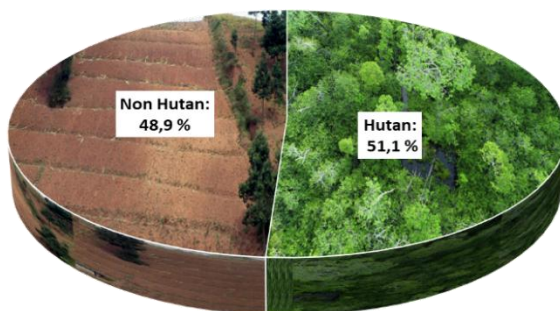
tergabung dalam anggota GFOI, dengan perkiraan target sebesar +300 peserta.

- e. Melalui email dan surat Senior Forestry Officer Global Forest Resources Assessment Forestry Division FAO Headquarters tanggal 10 September 2025, Direktur IPSDH telah diminta untuk menjadi salah satu pembicara dan menyampaikan pemaparan perihal proses pemantauan hutan dan karbon secara paralel dilanjutkan dengan diskusi bersama yang akan mengeksplorasi bagaimana negara-negara dapat memanfaatkan kapabilitas pemantauan hutan yang telah mereka bangun untuk mendukung estimasi emisi gas rumah kaca; peningkatan pemahaman tentang sumber daya hutan; pemantauan kebakaran lahan; pelacakan rantai pasok komoditas; dan penilaian keanekaragaman hayati.*
- f. Sesuai komunikasi dengan pihak FAO, Direktur IPSDH diharapkan (telah dikonfirmasi) akan mengisi 2 (dua) materi pada Sidang Pleno pada GFOI 2025 salah satunya terkait National Forest Inventory; Highlight the essential of NFO's in providing high quality in situ data that support national priorities. Introduce regional NFI networks and showcase how NFI's contributes to climate goals.*

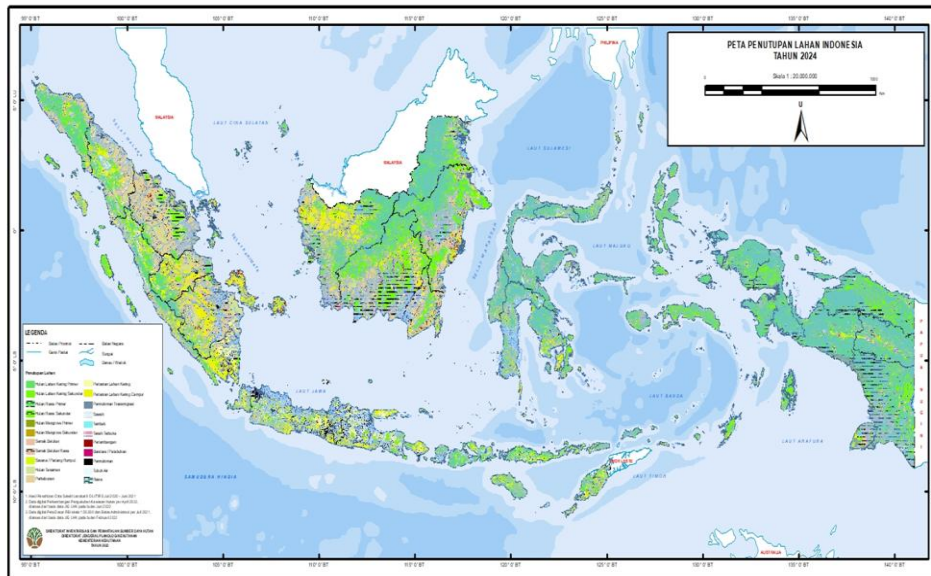
3.5.1.1 Peny. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional

Pada tahun 2024, luas daratan Indonesia tercatat sekitar 187 juta hektare. Dari luas tersebut, sekitar setengah wilayah Indonesia masih tertutup hutan, sementara sisanya merupakan lahan non hutan seperti pertanian, perkebunan, permukiman, dan penggunaan lainnya.

Secara rinci, luas lahan berhutan mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1 persen, sedangkan lahan tidak berhutan seluas 91,5 juta hektare atau 48,9 persen. Data ini menunjukkan bahwa hutan masih menjadi penutup lahan terbesar di Indonesia, meskipun tekanan terhadap kawasan hutan masih cukup tinggi.



Gambar 11 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2024, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan



Gambar 12 Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2024

Jika dilihat berdasarkan status kawasan, sebagian besar kawasan hutan masih tertutup hutan. Dari total 117,6 juta hektare kawasan hutan, sekitar 87,8 juta hektare (74,6 persen) masih berupa hutan, sedangkan 29,8 juta hektare (25,4 persen) telah berubah menjadi lahan tidak berhutan. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun kawasan hutan secara hukum ditetapkan sebagai kawasan lindung atau produksi, sebagian di antaranya telah mengalami pembukaan atau perubahan tutupan lahan.

Sementara itu, di luar kawasan hutan atau yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), kondisi penutupan lahannya didominasi oleh lahan non hutan. Dari total 69,4 juta hektare APL, hanya sekitar 7,7 juta hektare (11,2 persen) yang masih berupa hutan. Sisanya telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan non-kehutanan seperti pertanian, perkebunan, permukiman, dan infrastruktur. Keberadaan hutan di APL, terutama hutan primer, dinilai sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga lingkungan di tengah intensitas pemanfaatan lahan yang tinggi.

Secara keseluruhan, data penutupan lahan tahun 2024 memberikan gambaran kondisi terkini hutan Indonesia yang masih relatif luas, namun memerlukan pengelolaan yang konsisten dan pengawasan berkelanjutan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan kehutanan, pengendalian deforestasi, serta perumusan kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah

Benchmarking

Direktorat IPSDH menggunakan data penutupan lahan sebagai indikator kinerja strategis dalam pengelolaan sumber daya hutan nasional. Berdasarkan hasil pemantauan nasional tahun 2024, luas lahan berhutan di Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1% dari total daratan, dengan deforestasi netto sebesar 175,4 ribu hektare setelah dikurangi reforestasi.

Jika dibandingkan dengan data global dari Global Forest Resources Assessment (FRA) 2025 FAO, terlihat bahwa secara global hutan masih mengalami net loss sekitar 4,12 juta hektare per tahun (2015–2025), dengan deforestasi bruto tahunan sekitar 10,9 juta hektare yang masih lebih tinggi dibandingkan perluasan hutan baru.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penutupan lahan, angka deforestasi nettonya relatif lebih rendah dibandingkan tren global, mencerminkan kemajuan dalam pengendalian kehilangan tutupan hutan melalui kebijakan konservasi dan moratorium wilayah sensitif. Assesmen ini menjadi tolok ukur penting untuk evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang diukur Direktorat IPSDH dalam konteks global

3.5.1.3 Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar penundaan pemberian izin baru pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi hutan dan ekosistem gambut serta mendukung upaya pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

1. SK Menteri LHK Nomor 554

SK ini menetapkan PIPPIB sebagai acuan sementara dalam pengendalian pemberian izin baru pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Dalam SK ini, total luas indikatif PIPPIB yang ditetapkan mencapai sekitar 66,2 juta hektare. Luasan tersebut terdiri dari kawasan hutan alam primer baik di dalam kawasan hutan maupun di luar

kawasan hutan (APL), serta ekosistem gambut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penetapan PIPPIB pada tahap ini menjadi dasar awal penguatan tata kelola perizinan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

2. SK Menteri LHK Nomor 6156 Tahun 2025

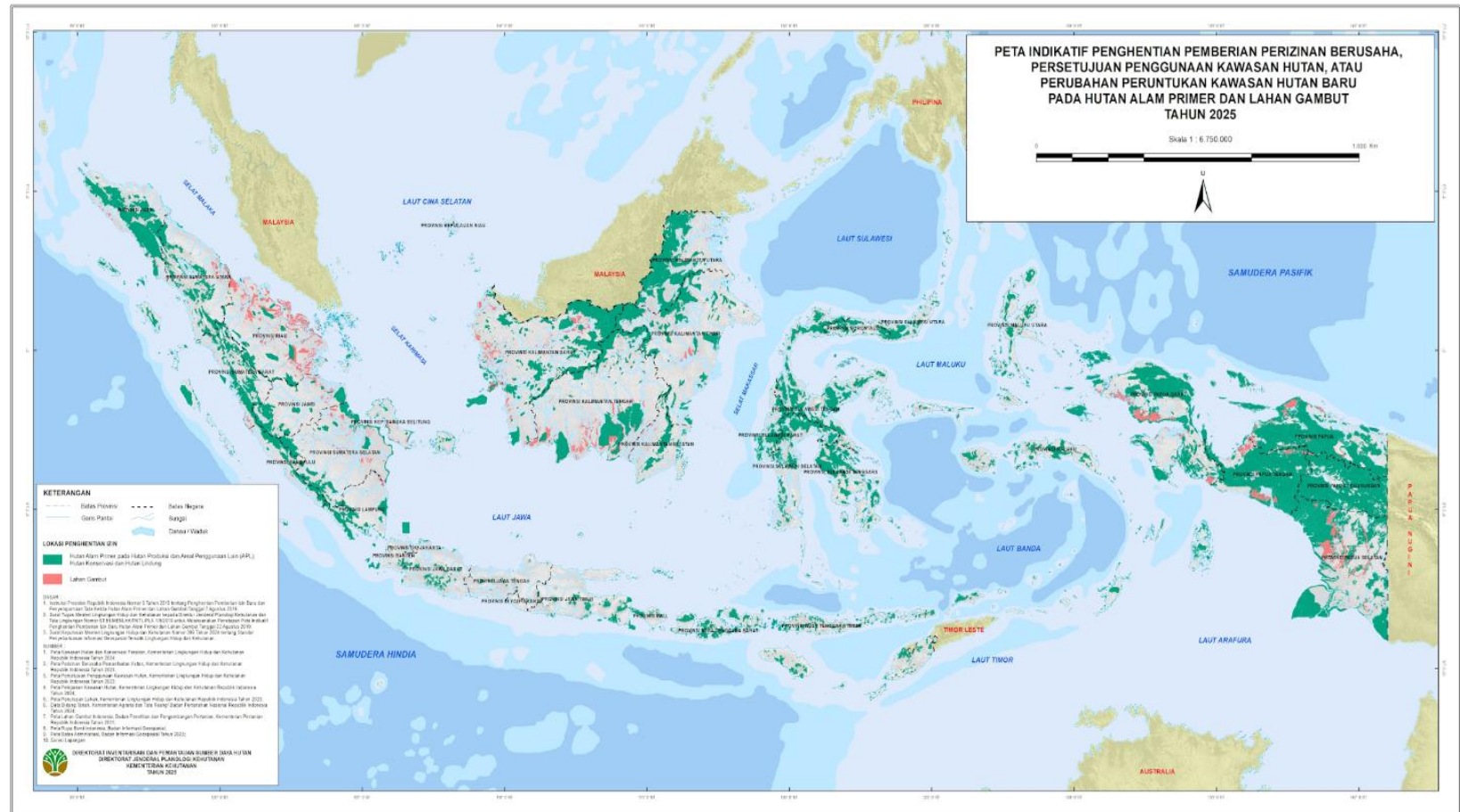
SK ini merupakan pemutakhiran PIPPIB periode II Tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan hasil sinkronisasi data, penyesuaian kebijakan, serta verifikasi lapangan. Dalam SK ini, luas indikatif PIPPIB ditetapkan menjadi sekitar 66,9 juta hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 0,7 juta hektare dibandingkan SK sebelumnya. Perubahan luasan ini dipengaruhi oleh penyesuaian batas kawasan, perbaikan data spasial, serta penguatan perlindungan pada kawasan hutan alam primer dan gambut yang dinilai strategis.

PIPPIB TAHUN 2025 PERIODE II

LUAS AREAL PIPPIB

- PIPPIB KAWASAN
51 Juta Ha
- PIPPIB GAMBUT
4,9 Juta Ha
- PIPPIB PRIMER
9,6 Juta Ha

LUAS TOTAL
65,7 Juta Ha



PERKEMBANGAN INPRES DAN SK PIPPIB

INSTRUKSI PRESIDEN → Perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali

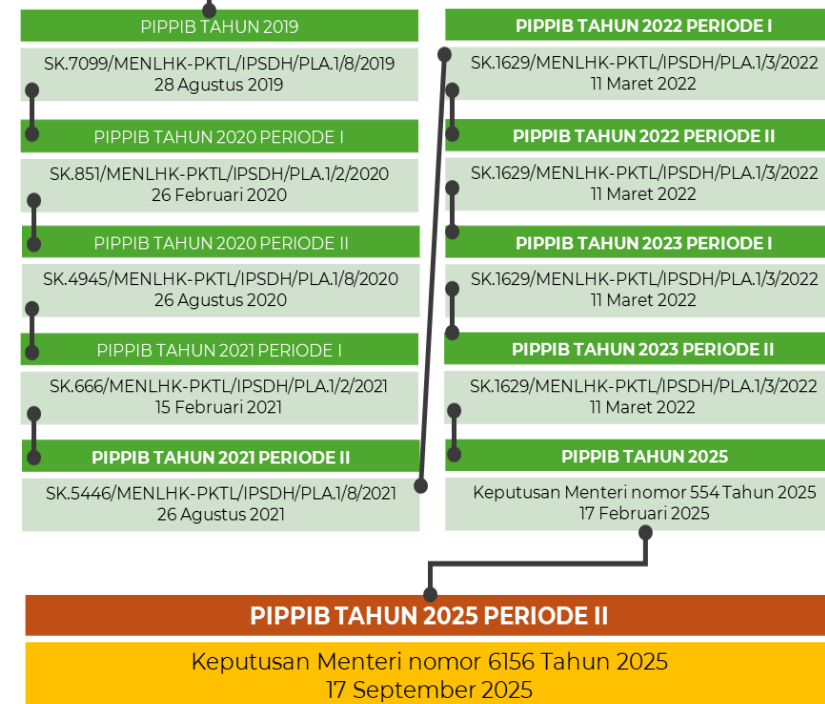
menjadi "**PENGHENTIAN**"

INPRES 10/2011 10 Mei 2011	PIPIB	REVISI I	REVISI II	REVISI III
	SK.323/Menhut-II/2012 20 Juni 2011	SK.7416/Menhut-VII/ IPSDH/2011 22 November 2011	SK.2771/Menhut-VII/ IPSDH/2012 16 Mei 2012	SK.6315/Menhut-VII/ IPSDH/2012 19 November 2012
INPRES 6/2013 13 Mei 2013	REVISI IV	REVISI V	REVISI VI	REVISI VII
	SK.2796/Menhut-VII/ IPSDH/2013 16 Mei 2013	SK.6018/Menhut-VII/ IPSDH/2013 13 November 2013	SK.3706/Menhut-VII/ IPSDH/2014 13 Mei 2014	SK.6982/Menhut-VII/ IPSDH/2014 13 November 2014
INPRES 8/2015 13 Mei 2015	REVISI VIII	REVISI IX	REVISI X	REVISI XI
	SK.2312/Menhut-VII/ IPSDH/2015 27 Mei 2015	SK.5385/MENLHK- PKTL/ IPSDH/2015 20 November 2015	SK.2300/MENLHK- PKTL/ IPSDH/PLA.1/5/2016 20 Mei 2016	SK.6347/MENLHK- PKTL/ IPSDH/PLA.1/11/2016 21 November 2016
INPRES 6/2017 17 Juli 2017	REVISI VIII	REVISI IX	REVISI X	REVISI XI
	SK.351/MENLHK/ SETJEN/PLA.1/7/2017 31 Juli 2017	SK.6559/MENLHK- PKTL/ IPSDH/PLA.1/12/2017 4 Desember 2017	SK.3588/MENLHK- PKTL/ IPSDH/PLA.1/5/2018 28 Mei 2018	SK.8599/MENLHK- PKTL/ IPSDH/PLA.1/12/2018 17 Desember 2018

INPRES 5/2019

7 Agustus 2019

tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut



Kegiatan Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB ini adalah untuk memproses permohonan revisi areal indikatif penghentian pemberian perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang datanya digunakan untuk pemutakhiran data PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Tabel 26 Pelayanan Persuratan terkait PIPPIB Tahun 2025

Kategori	Indikator	Jumlah	Keterangan
Volume	Total Surat Masuk	1.874	Berdasarkan daftar surat masuk.
	Disposisi Terselesaikan	1.313	Berdasarkan daftar surat keluar/konsep turun (masih <i>ongoing</i>).
	Surat Belum Selesai	561	Selisih surat masuk dan dispo, belum dikurangi surat Masuk berupa Undangan. (masih <i>ongoing</i>).
Metode Distribusi	Pengiriman via Pos	1.544	Berdasarkan bukti pengeluaran yang ada. (Surat Tujuan + Tembusan)
	Diantar Langsung	547	Berdasarkan bukti pengeluaran yang ada. Beberapa diambil tanpa bukti pengeluaran.
	Diambil Sendiri	66	Berdasarkan bukti pengeluaran yang ada. Beberapa diambil tanpa bukti pengeluaran.

*Berdasarkan data di persuratan PIPPIB 2025

Keselarasan PIPPIB dalam Praktik Global

Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) berperan dalam penyediaan data spasial kebijakan kehutanan, salah satunya melalui penyusunan dan pemutakhiran Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Instrumen ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pengendalian deforestasi dan perlindungan ekosistem bernilai penting, khususnya hutan alam primer dan lahan gambut.

Secara internasional, PIPPIB dapat dibenchmarking dengan praktik pengelolaan hutan di berbagai negara dan kerangka global yang menerapkan pendekatan pembatasan izin dan penetapan kawasan perlindungan berbasis peta. FAO melalui Global Forest Resources Assessment (FRA) dan kerangka REDD+ safeguards mendorong negara-negara berhutan untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan hutan primer serta ekosistem sensitif sebagai bagian dari upaya pengendalian deforestasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan PIPPIB yang menempatkan peta indikatif sebagai instrumen preventif dalam tata kelola perizinan.

Praktik serupa juga diterapkan di negara-negara berhutan tropis, seperti Brasil, melalui pengaturan kawasan lindung dan pembatasan izin baru di wilayah Amazon, serta di sejumlah negara lain yang menetapkan no-go areas atau zona perlindungan ketat bagi hutan primer. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penggunaan peta kebijakan sebagai dasar pengendalian perizinan merupakan praktik yang lazim secara global.

Dengan demikian, PIPPIB yang disusun dan diperbarui secara periodik oleh Direktorat IPSDH menunjukkan keselarasan dengan praktik internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Keberadaan PIPPIB tidak hanya berfungsi sebagai acuan nasional dalam pengendalian perizinan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pelaporan dan komitmen global di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan kontribusi nyata Direktorat IPSDH dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memenuhi standar dan arah pengelolaan hutan yang diakui secara internasional.

3.5.1.4 Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi

Kementerian Kehutanan melakukan pemantauan deforestasi di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menggunakan citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tahun 2024 angka deforestasi netto tercatat sebesar 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.

Dilihat dari lokasinya, tekanan terhadap tutupan hutan masih didominasi di dalam kawasan hutan negara, yang menyumbang sekitar 64,5% (113,1 ribu ha) dari total deforestasi netto nasional. Wilayah Hutan Produksi menjadi area yang paling dinamis karena di sinilah

aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan konversi lahan untuk pembangunan sektor non-kehutanan paling banyak terjadi.

Sementara itu, di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL), deforestasi tercatat sebesar 62,3 ribu ha. Hal ini menunjukkan bahwa sisa-sisa hutan di lahan milik masyarakat atau perusahaan swasta juga terus mengalami penyusutan akibat perluasan pemukiman dan pertanian.

Potret Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Jika kita membedah pulau demi pulau, Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi pada periode ini, menyumbang hampir separuh (44,5%) dari total deforestasi nasional. Disusul kemudian oleh Pulau Kalimantan (30,5%).

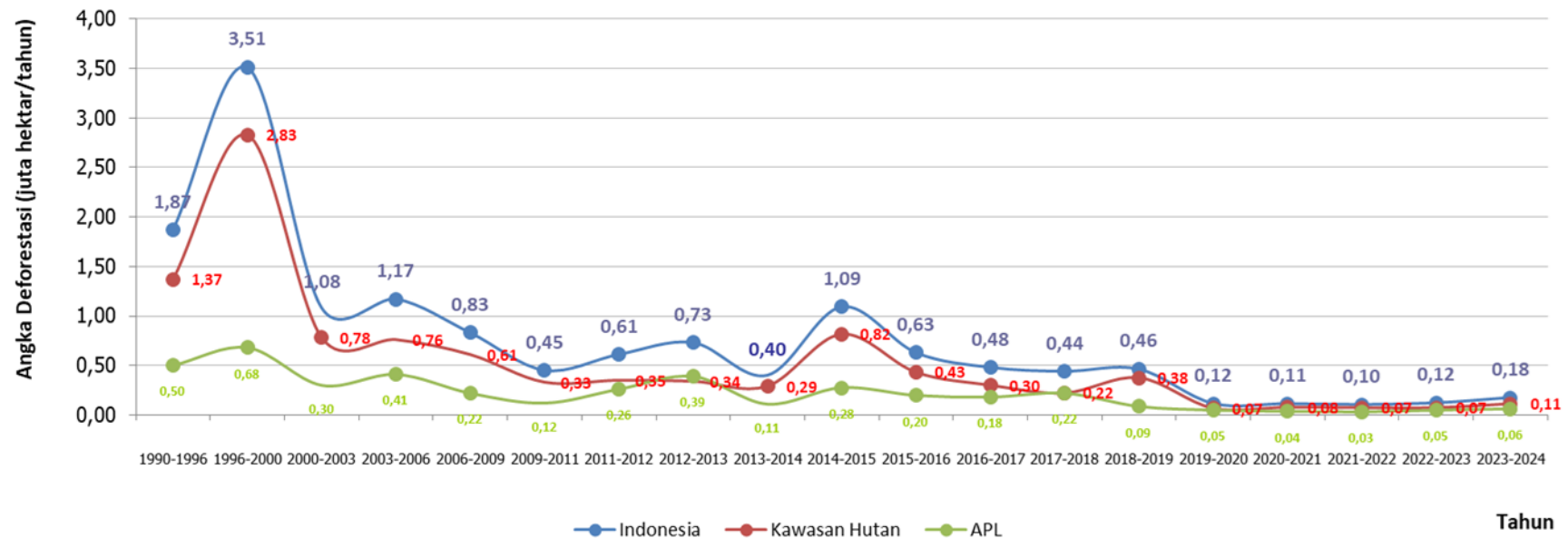
Secara administratif, Kalimantan Timur dan Riau menjadi dua provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi. Hal ini erat kaitannya dengan intensitas kegiatan ekonomi berbasis lahan di kedua provinsi tersebut. Di sisi lain, sebuah capaian positif terlihat di Provinsi Bali, yang pada periode ini berhasil menjaga wilayahnya tanpa terdeteksi adanya deforestasi bruto.

Hutan Sekunder (hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah ditebang) menjadi tipe hutan yang paling banyak hilang. Hal ini menandakan bahwa hutan-hutan yang sedang dalam masa pemulihan ini sangat rentan dialihfungsikan. Sebaliknya, pada kategori Hutan Tanaman, Indonesia menunjukkan tren positif di mana angka reforestasi (penanaman kembali) jauh lebih besar daripada angka penebangannya. Ini mencerminkan keberhasilan dari siklus tanam-tebang di sektor hutan tanaman industri yang mulai seimbang.

Meskipun angka deforestasi terus dipantau secara ketat, tantangan berupa konversi lahan untuk sektor lain, aktivitas ilegal, serta faktor alam seperti kebakaran hutan tetap menjadi ancaman nyata. Data ini menjadi "alarm" bagi Direktorat IPSDH untuk terus memperkuat sistem pemantauan berbasis teknologi satelit agar intervensi di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Gambar 17. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2024

PERKEMBANGAN ANGKA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 1990 – 2024 (JUTA HA/TH)

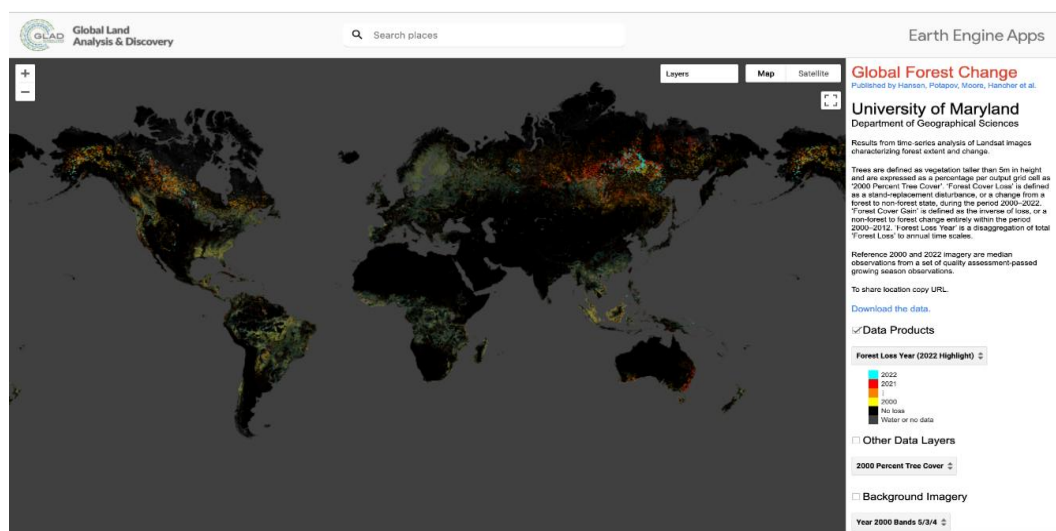


Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun ini terjadi sedikit kenaikan namun tetap lebih rendah daripada rata-rata deforestasi sepuluh tahun terakhir terutama jika dibandingkan dengan kejadian elnino pada tahun 2015 dan 2019 yang kurang lebih sama dengan tahun ini

Pemantauan Hutan Nasional vs Pemantauan Hutan Global

Indonesia bukan satu-satunya negara yang melaksanakan pemantauan hutan terhadap wilayah Indonesia. Ada organisasi lain yang turut serta melakukan pemantauan hutan terhadap wilayah Indonesia, antara lain yang dilaksanakan oleh University of Maryland, College Park (UMD). Hasil pemantauan global terhadap hutan dinamakan Global Land Analysis and Discovery (GLAD) dipublikasikan setiap tahun. GLAD hanya membagi hasil klasifikasi dengan dua kelas (hutan dan bukan hutan), berbeda dengan Indonesia yang mempergunakan 23 kelas penutupan lahan. Hasil GLAD ini dipublikasikan dalam bentuk Tree Cover Loss. Hasil ini lebih bersifat untuk publikasi ilmiah dan kepentingan scientific.

Pada perkembangannya data GLAD secara nasional diambil alih oleh organisasi internasional, yaitu Global Forest Watch (GFW) yang dieksekusi oleh World Resource Institute (WRI); dan menjadi salah satu portal global yang paling banyak diakses oleh publik dunia. Yang menjadi permasalahan, hasil telaah perubahan penutupan lahan yang ada (Tree Cover Loss), kemudian dipublikasikan GFW sebagai Deforestasi. Disinilah kemudian timbul masalah, karena besaran hasil telaahnya jauh lebih besar dari hasil telaah Indonesia. Dalam hal ini besaran tutupan areal hutannya (Tree cover) juga lebih besar daripada data Indonesia, karena memasukkan juga kelas-kelas belukar tua, juga perkebunan campur seperti jungle rubber, atau areal kebun buah-buahan campur dan sawit. Akibatnya apabila ada perubahan dalam kelas-kelas tutupan yang bagi Indonesia bukan masuk kategori hutan, oleh GFW dikategorikan sebagai deforestasi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu kerugian bagi Indonesia. Tree Cover loss dari Global Land Analysis and Discovery yang juga diambil dan dipublikasikan oleh GFW disajikan pada gambar berikut.



Gambar 13. Gambar Tree Cover loss dari Global Land Analysis and Discovery yang juga dipakai untuk kampanye dan publikasi oleh Global Forest Watch

Pembahasan dan komunikasi yang lebih baik dan intensif dengan GFW, juga dengan University of Maryland (sebagai pembangun metodologi), masih perlu dilakukan lebih lanjut oleh KLHK c.q. Direktorat IPSDH, mengingat bahwa kriteria-kriteria lokal yang dipakai oleh Indonesia, harus terus diketahui, dipahami dan diakui oleh pihak-pihak internasional atau global. Kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin dan sistematis, mengingat bahwa pihak-pihak global juga terus berganti-ganti pengelola dan ekspert; dan data GFW banyak dipakai sebagai acuan negara-negara maju untuk isu perubahan iklim dan perdagangan internasional.

Tabel 27 Contoh perbandingan data luas hutan Indonesia berdasarkan kriteria nasional dan kriteria global yang dipergunakan oleh EU (data EU menggunakan data global yang sejalan data GFW)

Component	Indonesia Forest		EU Forest
	Indonesian definition	EU definition	
	A	B	C
Territorial Area coverage (Mha)	187.8	187.8	422.4
Forested Area coverage (Mha)	94.1	158.7	180.3
Forest coverage (%)	50.13%	84.52%	42.67%
Definition of forest	Forest cover: 30% tree canopy cover (area > 6,25ha)	Forest cover: 10% tree canopy cover + other wooded land (5% tree canopy cover)	
Definition of deforestation	Change from forested class to non-forested class	Deforestation + Forest Degradation	

3.5.1.5 Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan

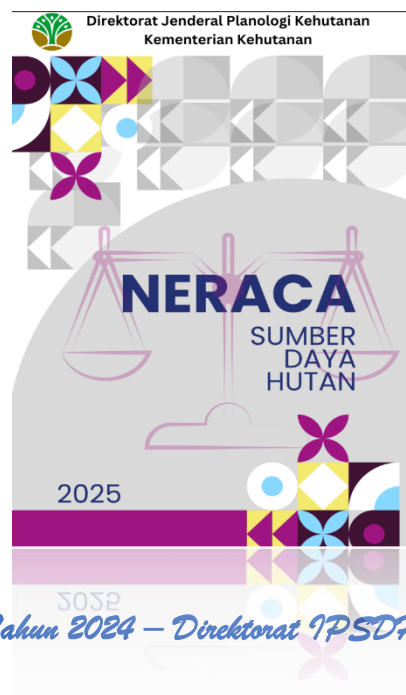
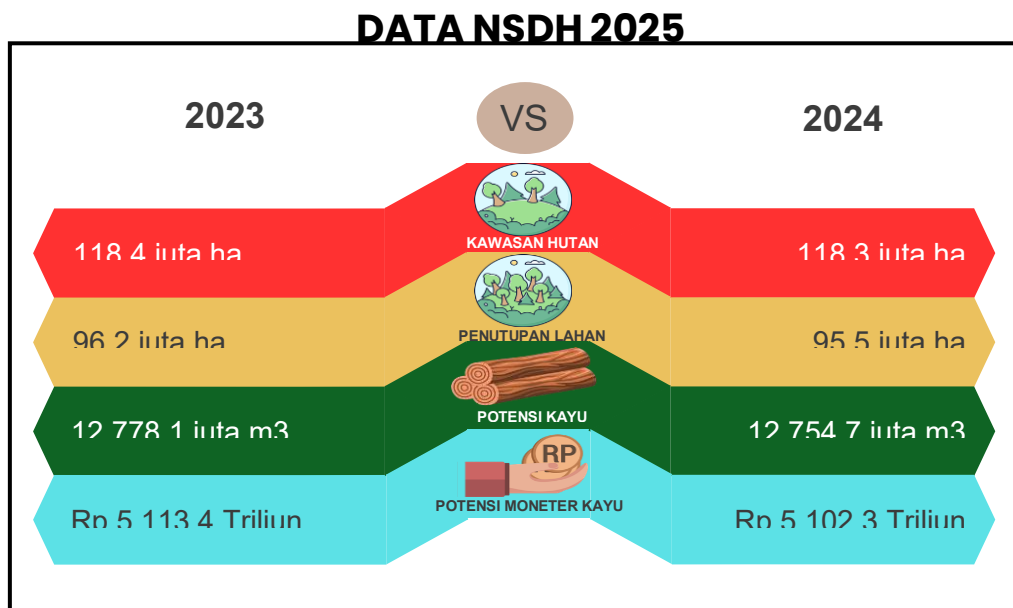
Indonesia mengawali tahun dengan kekayaan hutan seluas 96 juta hektar. Sepanjang tahun berjalan, terjadi dinamika yang menyebabkan saldo lahan kita berkurang sebesar **175,4 ribu hektar**. Angka ini bukan sekadar hilangnya pepohonan, melainkan mencerminkan adanya pergeseran fungsi lahan untuk mendukung pembangunan nasional, infrastruktur, maupun akibat faktor alam.

Secara ekonomi, angka **Rp 3.109,7 Triliun** menunjukkan bahwa hutan bukan hanya paru-paru dunia, tetapi juga pilar ekonomi negara. Nilai ini dihitung berdasarkan potensi kayu yang ada di hutan alam maupun hutan tanaman. Penurunan nilai sebesar Rp 4,1 Triliun tahun ini menjadi

peringat (warning) bahwa setiap hektar hutan yang hilang memiliki konsekuensi finansial yang nyata terhadap kekayaan sumber daya alam kita.

Papua dan Kalimantan: Benteng Terakhir

NSDH 2025 mempertegas bahwa Papua adalah "brankas" utama kekayaan hutan Indonesia. Dengan luas lebih dari 34 juta hektar dan nilai moneter kayu mencapai lebih dari seribu triliun rupiah, masa depan stabilitas sumber daya hutan kita sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola wilayah Timur Indonesia. Sementara itu, Kalimantan tetap menjadi wilayah dengan aktivitas mutasi (perubahan) paling dinamis.



Gambar 14 Buku NSDH Tahun 2025

Metodologis Nasional Vs Standar Internasional

Penilaian Neraca Sumber Daya Hutan Indonesia menunjukkan neraca fisik dan moneter potensi kayu nasional melalui data inventarisasi PSP/TSP yang diolah Direktorat IPSDH sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Hasil NSDH memperlihatkan saldo awal potensi volume kayu lebih dari 12.800 juta m³ dengan defisit volume ±14,8 juta m³ pada periode 2021–2022, serta perubahan luas hutan bersih sekitar 0,1 % dari saldo awal.

Secara internasional, hasil FAO Global Forest Resources Assessment (FRA) 2025 menjadi referensi benchmarking utama bagi data kehutanan lintas negara. FRA 2025 menyajikan indikator hutan seperti luas hutan nasional, perubahan tahunan, stok karbon dan biomassa berdasarkan laporan resmi negara anggota. Data global itu menunjukkan total hutan dunia mencapai sekitar 4,14 miliar ha dengan tren deforestasi sekitar 10,9 juta ha per tahun, sekaligus menjadi kerangka perbandingan bagi neraca sumber daya hutan nasional Indonesia. Perbandingan antara NSDH Indonesia dan data FRA memperlihatkan kekuatan metodologis nasional yang selaras dengan standar internasional sekaligus menegaskan arah kebijakan pengelolaan hutan lestari

3.5.2 IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya

Tabel 28 Realisasi Pelaksanaan IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya

Sasaran Kegiatan	IKK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	160 Dokumen	214 Dokumen	133%

Tabel 29 Progres Pelaksanaan IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya

KEGIATAN	IKK	KRO	RO	TAHUN 2025		Output
				Target	Realiasi	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Data dan Informasi Publik	<i>Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan</i>	160 Dokumen	214 Dokumen	214 Permohonan IGT Kehutanan kepada Walidata Geospasial

Direktorat IPSDH sesuai dengan Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021 juga ditetapkan sebagai Walidata Geospasial yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG. Walidata Geospasial juga bertugas dalam melakukan pengelolaan metadata IGT, membangun dan memelihara basis data geospasial Kementerian, melakukan koordinasi dengan Produsen DG dan UPT dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan penjaminan kualitas dan penyebarluasan IGT. Selain itu, juga melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkannya kepada Menteri.

Sampai dengan Desember 2025, jumlah IGT lingkup Kementerian Kehutanan yang tersedia di dalam basis data dan dikelola oleh Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial Kementerian Kehutanan adalah sebanyak 81 IGT. IGT yang tersedia saat ini belum memenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permen LHK Nomor 24 tahun 2021 dan lampiran SK Menteri LHK Nomor 400 tahun 2024, dimana masih terdapat beberapa IGT yang belum tersedia (dalam proses penyusunan oleh Produsen DG).

Sesuai rekapitulasi hasil pelayanan data hingga Desember 2025, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial telah memberikan pelayanan melalui surat sebanyak 256 permohonan. Data yang paling banyak diminta adalah IGT Kawasan Hutan dan IGT Penutupan Lahan. Sedangkan pemohon paling banyak adalah dari Pemerintah Daerah, baik provinsi dan kabupaten maupun kota yang membutuhkan data sebagian besar adalah untuk penyusunan/revisi Rencana Tata ruang dan Wilayah. Selain itu juga banyak pemohon data dari kementerian/lembaga lain yang diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi dan pengambilan keputusan serta perguruan tinggi

untuk keperluan penelitian.



Permohonan IGT Kehutanan kepada
Walidata Geospasial Dari Januari s.d.
Desember Tahun 2025 sebanyak:

214 Permohonan

Gambar 15 Rekapitulasi Pelayanan Data hingga Desember 2025

Walidata Geospasial memiliki kewenangan pengaturan terhadap akses basis data geospasial (SIGAP Kemenhut) yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT KLHK dan pengguna lainnya (K/L/Pemda).

Kebijakan Satu Peta yang sampai dengan saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dilaksanakan dalam upaya mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Astacita diperlukan guna menjadi acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Kementerian Kehutanan yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki peran, tanggung jawab dan capaian terhadap 25 IGT dengan Status terkompilasi dan terintegrasi seluruhnya (21 IGT).

Tabel 30 21 IGT Lingkup Kementerian Kehutanan

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
1.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Penutupan Hutan Tahun 2024 (Pemutakhiran Februari 2025) 2. Deforestasi 2023 – 2024 (Pemutakhiran Februari 2025) 3. Reforestasi 2023 – 2024 (Pemutakhiran Februari 2025) 4. PIPPIB Periode II tahun 2025 (Pemutakhiran September 2025)
2.	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) (Pemutakhiran November 2024) 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL dan KPHP) (Pemutakhiran September 2025) 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Pemutakhiran Oktober 2025)
3.	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	Kawasan Hutan (Pemutakhiran Juni 2025)
4.	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan (Pemutakhiran Mei 2025)
5.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	1. Sebaran Satwa Dilindungi (Pemutakhiran 2025) 2. Perjumpaan Tumbuhan Alam Pada Kawasan Konservasi (Pemutakhiran 2025) 3. Konflik Satwa dan Manusia (Pemutakhiran 2025)
6.	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peta Arah Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Pemutakhiran Agustus 2025)
7.	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	1. Penetapan Status Hutan Adat (Pemutakhiran September 2025) 2. Penetapan Status Hutan Hak (Pemutakhiran September 2025)
8.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	1. Sebaran Hotspot Kawasan Hutan (Pemutakhiran Januari-September 2025) 2. Areal Kebakaran Kawasan Hutan (Pemutakhiran Januari-Oktober 2025)

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
9.	Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Prioritas Lokasi (IPL) (Pemutakhiran April 2024) 2. Tipologi Kelembagaan (Pemutakhiran Tahun 2022) 3. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia FOLU NET Sink 2030 (Pemutakhiran April 2024) 4. Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (Pemutakhiran Januari 2024)

Direktorat IPSDH secara aktif berkoordinasi dengan Produsen DG yang bertanggungjawab terhadap IGT dimaksud, kemudian menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG selaku Ketua Satuan Tugas 1 Sekretariat KSP mengenai capaian target renaksi 21 IGT Kemenhut yang masuk dalam Renaksi KSP.

Tabel 31 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan yang Belum Tersedia

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
1.	Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	Indikatif Pemulihan Ekosistem
2.	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan
3.	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Tabel 32 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan yang Perlu Dimutakhirkan

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
1.	Direktorat IPSDH	Sebaran Klaster IHN (Mei 2020)
2.	Direktorat RPKHPWPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKTN 2011-2030 (September 2019) 2. PIAPS Rev IX (April 2024) 3. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (Juli 2024) 4. Pelepasan KH (Desember 2023)
3.	Direktorat Pengukuhan KH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan KH (Juli 2024) 2. Indikatif PPTPKH (Maret 2024)
4.	Direktorat Perencanaan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Pengelolaan Taman Nasional (TN) (Januari 2022) 2. Blok Pengelolaan CA, SM, TWA, Tahura dan TB (Januari 2019)

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
5.	Direktorat Konservasi Kawasan	1. Daerah Penyangga (Juni 2021) 2. 2. Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional (Desember 2021)
6.	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Jasa Lingkungan Karbon di KSA dan KPA (September 2020)
7.	Direktorat PEPDAS	1. Lahan Kritis (Desember 2022) 2. Rawan Limpasan (2015) 3. Rawan Erosi (2018) 4. Klasifikasi DAS (Februari 2022)
8.	Direktorat Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan	Penerapan Teknik Konservasi Tanah (2021 s.d. 2022)
9.	Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan	Zona Benih Tanaman Hutan (2014)
10.	Direktorat PUPH	Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (September 2023)
11.	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	1. Hutan Penelitian (Oktober 2020) 2. Petak Ukur Permanen (Oktober 2020)

REVISI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IGT

Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan tata kelola kelembagaan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami pemisahan organisasi menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Perubahan peraturan yang dituangkan dalam Rapermenhut tersebut diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik di sektor kehutanan dalam rangka penguatan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial, baik dari aspek kebijakan dan peraturan, kelembagaan, standar, teknologi, maupun penguatan sumber daya manusia.

Proses saat ini: sudah dilaksanakan harmonisasi Rapermenhut tentang Penyelenggaraan IGT Kehutanan dengan Kemenkum, menunggu tandatangan Menteri dan diundangkan oleh Kemenkum.

Benchmarking IGT terhadap Praktik Internasional

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Direktorat IPSDH menunjukkan keselarasan yang kuat dengan kerangka kerja internasional United Nations Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF). Hal ini tercermin dari adanya tata kelola data yang jelas, ketersediaan data tematik kehutanan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan IGT sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sumber daya hutan. IGT yang dihasilkan telah berfungsi sebagai instrumen kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan prinsip UN-IGIF yang menempatkan data geospasial sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek teknis dan integrasi, pengelolaan IGT Direktorat IPSDH telah memenuhi prinsip interoperabilitas dan standarisasi sebagaimana dianut oleh Open Geospatial Consortium (OGC), serta terintegrasi dalam ekosistem Spatial Data Infrastructure (SDI) nasional melalui Kebijakan Satu Peta. Data IGT disajikan secara terstandar, dapat dipertukarkan lintas sistem, dan diakses melalui platform geospasial yang mendukung koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor. Keselarasan dengan standar OGC dan praktik SDI ini menegaskan bahwa pengelolaan IGT IPSDH tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga telah mengikuti praktik terbaik internasional dalam pengelolaan informasi geospasial kehutanan.

3.5.3 IKK Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan

Salah satu Indikator Kinerja pada Tahun 2025 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 84 poin. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) kompone evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi: perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2025, dan sesuai dengan Nota Dinas Setjen Kementerian Kehutanan Nomor ND 2784/SETJEN/ROCAN/REN.02.02/B/12/2025, Direktorat IPSDH memperoleh nilai sebesar 77,59. Realisasi hasil penilaian Tahun 2025 ini berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 84 Poin.

Tabel 33 Matriks Hasil Evaluasi Akuntabilitas Direktorat IPSDH Tahun 2025

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30.00	30.06
2	Pengukuran Kinerja	30.00	30.03
3	Pelaporan Kinerja	15.00	14.88
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	25.01
Nilai Akuntabilitas Kinerja			77.59

3.5.4 IKK Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian desain penyelenggaraan SPIP, laporan triwulan, serta laporan tahunan dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP yang telah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memperoleh total nilai 3.90.

Tabel 34. Hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025

NO	PENILAIAN	PENILAIAN MANDIRI		PENJAMINAN KUALITAS	
		NILAI	LEVEL	NILAI	LEVEL
1	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	4.3	4	3.9	4
2	NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	4.6	5	3.7	5
3	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	5.0	5	3.3	5

3.6 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp10.163.000.000,- dengan total realisasi anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp10.156.224.547,- atau sebesar 99,93% dari pagu anggaran.

Alokasi anggaran Tahun 2025 guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35 Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

KEGIATAN	PAGU	TARGET		REALISASI		DEVIASI
		Rp.	%	Rp.	%	
Subdit ISDH	1,195,000,000	1,195,000,000	100.00	1,194,689,109	99.97	0.03
Subdit PSDH & IGK	8,135,000,000	8,135,000,000	100.00	8,128,923,138	99.93	0.07
Sub Bagian Tata Usaha	833,000,000	833,000,000	100.00	832,612,300	99.95	0.05
Jumlah	10,163,000,000	10,163,000,000	100.00	10,156,224,547	99.93	0.07

Sesuai **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025** terkait kebijakan fiskal yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia pada **22 Januari 2025** dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara dan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Direktorat IPSDH telah menetapkan alokasi anggaran untuk efisiensi sebesar Rp7.195.000.000,- hal tersebut menyebabkan perubahan pagu awal, sesuai dengan grafik berikut:



Pagu dan realisasi keuangan per Sub Direktorat lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

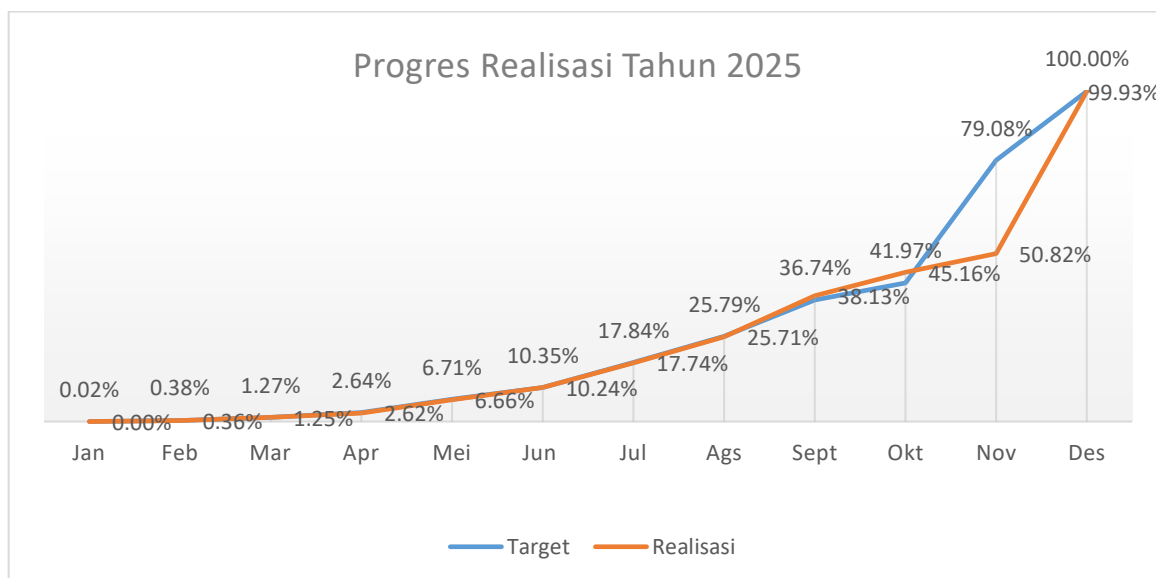
Tabel 36 Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)	Realisasi 2025		Deviasi (%)
			(Rp)	(%)	
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		9,330,000,000	9,323,612,247	99.93	0.07
Kegiatan: Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		9,330,000,000	9,323,612,247	99.93	0.07
KRO: Data dan Informasi Publik[Base Line]		9,330,000,000	9,323,612,247	99.93	0.07
RO: Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional		2,830,000,000	2,828,732,574	99.96	0.04
	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	375,000,000	374,956,190	99.99	0.01
	Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	390,000,000	389,738,616	99.93	0.07
	Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan	475,000,000	474,680,939	99.93	0.07

Uraian		Jumlah (Rp)	Realisasi 2025		Deviasi (%)
			(Rp)	(%)	
	Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut				
	Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1,160,000,000	1,159,362,526	99.95	0.05
	Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	430,000,000	429,994,303	100.00	0.00
RO: Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan		6,500,000,000	6,494,879,673	99.92	0.08
	Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik LHK	6,000,000,000	5,998,096,035	99.97	0.03
	Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	500,000,000	496,783,638	99.36	0.64
Program: Dukungan Manajemen		833,000,000	832,612,300	99.95	0.05
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		833,000,000	832,612,300	99.95	0.05
RO: Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]		833,000,000	832,612,300	99.95	0.05
	Layanan Umum	243,000,000	242,920,416	99.97	0.03
	Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	243,000,000	242,920,416	99.97	0.03
	Layanan Perkantoran	590.000.000	589.691.884	99.95	0.05

Uraian		Jumlah (Rp)	Realisasi 2025		Deviasi (%)
			(Rp)	(%)	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	590,000,000	589,691,884	99.95	0.05
Total		10,163,000,000	10,156,224,547	99.93	0.07

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran perbulan telah sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat melalui kesesuaian target dan realisasi anggaran yang terjadi selama tahun 2025:



Gambar 16. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2025

3.7 PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA

3.7.1 Prestasi dan Inovasi

Terkait dengan pembangunan ZI, prestasi dan penghargaan Direktorat IPSDH dalam melayani Masyarakat selama periode tahun 2020-2023:

- SIMONTANA sebagai Pemenang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020;
- Bhumandala Rajata Award (Perak) sebagai simpul jaringan terbaik Tahun 2020 dengan BIG sebagai penyelenggara;
- BIG TOP Geospasial Data Sharing Kategori K/L Tahun 2021;
- SIGAP meraih Bhumandala Kanaka (kategori emas) 2022 dan 2023 (Simpul Jaringan Terbaik dan Inovasi Pemanfaatan IG);
- Indonesia SDGs Award 2022 (Simontana);

- f. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) sesuai Surat Keputusan Menpan RB Nomor 1472 Tahun 2021.

3.7.2 Branding

Branding dilakukan untuk membuat pemahaman publik yang lebih baik tentang Direktorat IPSDH, termasuk memahami peran dan tugas serta tanggungjawabnya. Terkait dengan branding ini dipergunakan beberapa *tools* yang difokuskan untuk membuat familier beberapa produk kongkrit Direktorat IPSDH. Logo branding Direktorat IPSDH ditampilkan berikut:



SI APIS

Lebah Apis menjadi ikon SIGAP (Sistim Informasi Geospasial LHK) yang merupakan portal utama untuk Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial lingkup Kehutanan dan Lingkungan Hidup



SI BINO

Burung hantu Bino menjadi ikon untuk *National Forest Monitoring System* atau Sistim Monitoring Hutan Nasional alias Simontana. Sistim ini mengoptimalkan SIGAP



SI TAKHI

Kodok Takhi menjadi ikon untuk sistim untuk Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau PIPPIB. Semua data dan informasi geospasialnya mengoptimalkan SIGAP LHK

Gambar 17 Logo Branding Direktorat IPSDH

Diluar ketiga ikon yang dipilih di Direktorat IPSDH, juga ada satu ikon lagi yang saat ini sedang dalam taraf pembahasan, yaitu ikon untuk sistem Inventarisasi Hutan Nasional. Masih dalam kaitan dengan branding, juga ditetapkan Tim Media Sosial yang difokuskan pada para anggota muda di Direktorat IPSDH. Tim Medsos ini juga diarahkan untuk terus mengembangkan diri secara terus menerus, baik melalui pelatihan formal maupun mandiri.



Gambar 18 Beberapa produk yang dikeluarkan Tim Medsos Direktorat IPSDH

Dengan Melakukan Pembangunan Zona Integritas melalui perubahan dan inovasi yang dilakukan serta penerapan 6 area perubahan, Direktorat IPSDH siap menjadi satker menuju WBBM dan berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dengan sebaik baiknya. Namun demikian pada tahun 2024, Direktorat IPSDH belum berhasil untuk mendapatkan predikat WBBM, sehingga evaluasi dan perbaikan yang diperlukan, perlu segera dilakukan

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2024. Sedangkan efisiensi capaian kinerja tahun 2025 bernilai 0.07 yang menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, capaian fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan dan sasaran tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

4.2 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan penambahan SDM sesuai dengan beban kerja;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkup Direktorat;
3. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan;
4. Peningkatan kerjasama dengan para pihak terkait guna mendukung peningkatan capaian sasaran strategis;
5. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien;
6. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil kegiatan;.